

Buletin

Haba



*Dunia Maritim dalam Perspektif
Sejarah dan Budaya
Aceh & Sumatera Utara*

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh**

2015

74

H a b a

**Informasi Kesejarahan
dan Kenilaitradisional**

**No. 74 Th. XX
Edisi Januari - Maret 2015**

PELINDUNG

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

Rusjdi Ali Muhammad
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Cut Zahrina
Essi Hermaliza
Fariani
Angga

SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha
Bendaharawan
Yulhanis
Razali
Ratih Ramadhani
Santi Shartika

ALAMAT REDAKSI

Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651)23226
Email : bpnbbandaaceh@yahoo.com

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh dari pembaca 7-10 halaman diketik 2 spasi, Times New Roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepiasnya.

ISSN : 1410 – 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Sejarah

**Willems Toren: Mercusuar Bukti
Sejarah Masa Kolonial**

Wacana

Nasrul Hamdani

**Yang Dilupakan: Kuasa Aceh atas
Selat Melaka**

Hasbullah

**Stigma ‘Bajak Laut’ di Perairan
Aceh Pada Abad XIX**

Nurmila Khaira

**Cerita Rakyat Suku Singkil:
Harmoni Manusia dengan
Lingkungan Alam**

Fariani

**Mengenal Teknologi “Alat
Tangkap” Nelayan Tradisional di
Pesisir Timur Sumatera Utara**

Essi Hermaliza

**Nasib Pukat Tradisional di Era
Reformasi**

Dharma Kelana
Putra

**Potensi Tempat Pelelangan Ikan
Lampulo Terhadap Kesejahteraan
Komunitas Nelayan**

Harvina

**Lancang Kuning: Ekspresi Budaya
Bahari Melayu**

Sudirman

**Museum Bahari Aceh: Sebuah
Gagasan dan Konsep**

Cerita Rakyat

Ata Semonan

Pustaka

Seudati di Aceh

Cover

Dunia Maritim

Tema Haba No. 75 **Perniagaan dalam Perspektif
Sejarah dan Budaya Aceh dan
Sumatera Utara**

PENGANTAR

Redaksi

Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh memulai tahun 2015 dengan menerbitkan Buletin Haba dengan tema Dunia Maritim Dalam Perspektif Sejarah dan Budaya Aceh dan Sumatera Utara. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya sektor maritim di Indonesia, Dewan Redaksi memberi peluang kepada para penulis untuk mengeksplor dunia maritim menurut kacamata sejarah dan budaya khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kekayaan laut yang dimiliki berbanding lurus dengan kekayaan sejarah dan budaya, sehingga perlu di inventarisir dan dilestarikan secara lebih aplikatif.

Dalam edisi 74 tahun 2015, redaktur telah menerima banyak artikel yang tidak mudah untuk diseleksi. Semua artikel memiliki ragam topik dengan sudut pandang yang berbeda sehingga memberi daya tarik tersendiri pada terbitan kali ini. Sama luasnya dengan dunia maritim, masing-masing artikel yang berhasil masuk dalam terbitan mengetengahkan serba-serbi sejarah dan budaya yang berhubungan dengan laut. Ada yang tertarik dengan teknologi tradisional, ada pula yang menilik aspek hukum dalam budaya terkait aktivitas melaut. Tidak kalah menariknya, sejarah lokal yang menunjukkan keperkasaan masyarakat pesisir di Aceh dan Sumatera Utara juga ikut memberi daya tarik tersendiri terhadap buletin triwulan pertama tahun 2015 ini.

Apresiasi dan terima kasih, ditujukan kepada semangat para penulis yang telah secara mengirimkan artikelnya ke meja redaktur. Dapat dipastikan bahwa tulisan yang belum dimuat pada edisi ini bukan karena tidak laik, akan tetapi dikarnakan keterbatasan jumlah artikel yang dapat dimuat per edisi. Besar harapan kami, ini tidak menurunkan semangat para penulis, sebaliknya dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kemampuan kita agar berkarya lebih optimal.

Semoga terbitan No. 74 Tahun 2015 ini bermanfaat bagi kita semua.

Redaksi

WILLEMS TOREN: MERCUSUAR BUKTI SEJARAH MASA KOLONIAL

Tahukah anda bahwa satu dari tiga mercusuar peninggalan Belanda yang dikenal dengan nama Willem's Toren berada di Pulo Aceh? Membahas tentang dunia maritim dalam perspektif sejarah di Aceh, keberadaan mercusuar yang satu ini tentu saja tidak dapat dikesampingkan. Keberadaannya menunjukkan bahwa perang yang terjadi di Aceh merupakan kisah kolosal dalam catatan sejarah dunia. 350 tahun Belanda menjajah Aceh bukanlah waktu yang singkat, mercusuar yang telah berusia 140 tahun itu menjadi bukti nyata bahwa Belanda pernah menguasai perdagangan di Aceh.

Adalah Pulau Aceh, sebuah pulau yang tidak lebih populer dari Pulau Weh atau Sabang. Kira-kira dua jam perjalanan menggunakan kapal pukat nelayan dari dermaga Lampulo, Banda Aceh. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, bahkan masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar. Akan tetapi pulau yang terdiri atas dua pulau besar (Pulo Breuh dan Pulo Nasi) dan beberapa pulau kecil tanpa penghuni ini, sangat tampak jauh dari kemajuan pembangunan. Jalanan rusak, listrik terbatas, pengelolaan air kurang baik, masih ada desa terisolir, dan sebagainya. Padahal daerah ini menyimpan potensi wisata yang tidak kalah menakjubkan dibanding Sabang.

Menariknya, menempuh jalur darat dari dermaga Desa Gugop menuju puncak mercusuar tersebut, kita akan melintasi sebuah desa bernama Rinon. Menurut masyarakat setempat nama tersebut berasal dari singkatan RI-NOL, yang berarti titik Nol Kilometer Republik Indonesia. Karena pengaruh bahasa setempat, lama-kelamaan RI-Nol melebur menjadi RINON. Di persimpangan menuju Desa Meulingge, kaki gunung menuju mercusuar, terdapat sebuah patok beton bertuliskan "0 km". Belum ada referensi yang membahas

tentang hal ini, apakah mercusuar pernah menjadi titik Kilometer Nol atau tidak, karena dilihat dari peta Indonesia, jelas bahwa Pulau Weh terletak paling ujung. Perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai hal ini.

Setelah melalui jalan yang terjal dan menantang membuat kita sangat menghargai waktu kita ketika berada tepat di depan mercusuar tersebut. Serasa usaha kita terbayar sudah. Willem's Toren berdiri tegak dan gagah tepat di bibir jurang. Ditulis pada sebuah plakat besi, tulisan berbahasa Belanda menempel di menara pada ketinggian sekitar lima meter dari permukaan tanah. Posisinya tepat di atas pintu masuk. Tertulis:

*Willem's Toren 1875
Gesticht in oorlogstijd
Den vrede gewyd
Tevens een blijvende eerezuil voor al de
dapperen en braven, die ter bereiking van
dit doel des vredes hun bloed en leven ten
offer gaven*

Dapat diterjemahkan:

Menara Willem 1875
Didirikan pada masa perang
Sebuah kenangan abadi untuk setiap
keberanian dan para pemberani, untuk
mencapai tujuan damai ini darah dan
nyawa telah dikorbankan

Mercusuar tersebut terdiri atas dinding yang sangat tebal, lebih tebal dari serentangan tangan orang dewasa, setinggi kira-kira 85 meter berbentuk lingkaran, terbagi menjadi 7 lantai yang semakin kecil ke atas. Masing-masing lantai dilengkapi dengan tangga baja dengan bentuk melingkar, dan di setiap lantainya dilengkapi pula dengan jendela yang dapat difungsikan sebagai ventilasi udara

sekaligus ruang pantau. pada lantai kedua, terdapat sebuah ruangan yang ditutupi pintu berbahan kaca berwarna merah. Ruang khusus ini adalah standar internasional yang merupakan simbol bahwa kapal tidak dapat menepi terlalu dekat karena banyak karang. Sedangkan pada bagian puncak, terdapat sebuah lampu besar yang dipastikan tetap menyala di malam hari sebagai alat navigasi vital bagi kapal-kapal yang beraktifitas di Samudera Hindia.

Dibangun pada tahun 1875, masa Raja William III berkuasa (1817-1890), wajar saja jika nama mercusuar ini mengadopsi nama sang raja yang bernama lengkap Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, penguasa Luxemburg. Willem memang giat membangun ekonomi dan infrastruktur di wilayah Hindia Belanda, termasuk Pulo Aceh. Mercusuar selesai dibangun bertepatan dengan ulang tahun ke-65 Willem III. Tak hanya mercusuar ini saja, semua bangunan yang selesai pada masa itu didedikasikan untuk raja. Willem's Toren atau Menara Willem serupa juga ada di Hollands dan Kepulauan Karibia. Kini, yang berfungsi hanya mercusuar ini dan di kepulauan Karibia saja. Sedangkan Willem's Toren di Hollands telah berubah fungsi menjadi museum.

Sebuah plakat dekat pintu masuk tertulis pula berbahasa Belanda tanggal yang menunjukkan peristiwa sejarah terkait, yaitu 17 Agustus 1874 dan 30 Nopember 1874. Tercantum juga sebuah tanggal lagi yaitu 20 Juni 1875. Ketiga tanggal tersebut terangkai dalam sebuah kalimat seperti ini, "*werd de tourenbouw op den 17*

Augustus 1874 aangevangen op den 30 November 1874 eerste steen gelegd en op den 20 Juni 1875 het licht ontstoken", masing-masing menunjukkan tanggal pembangunan menara, peletakan batu pertama, dan waktu pertama kali lampu dinyalakan. Artinya, sudah 140 tahun pula lampu ini menjadi alat navigasi bagi pelintas Selat Malaka. Pembangunan menara suar pada tahun yang sama dengan pengumuman Aceh menjadi bagian dari Kerajaan Belanda secara sepihak ini membuktikan bahwa Belanda tidak main-main dalam menginvasi Aceh. Hasrat menguasai Aceh bukan hanya di daratan. Jalur laut pun tak luput dari cengkeraman Belanda. Maklum saja, sejak dibukanya Terusan Suez yang diarsiteki oleh Ferdinand de Lesseps pada 1870, peran Selat Malaka dalam perdagangan Internasional tentu menjadi lebih penting dari sebelumnya. Lebih banyak kapal-kapal pedagang dari Eropa yang akan meramaikan jalur Selat Malaka.

Mercusuar itu ternyata adalah situs monumental, namun kondisinya semakin memprihatinkan. Beberapa tangga di dalamnya telah rapuh dimakan usia, lampu utama yang dulunya terang benderang juga telah mengalami kerusakan. Perlu perhatian berbagai pihak untuk memelihara bukti sejarah yang satu ini. Apalagi untuk kepentingan kemaritiman, fungsi navigasi yang diemban menara ini selama ini kiranya perlu dipertahankan. [ehz]

Yang Dilupakan: Kuasa Aceh atas Selat Melaka

Oleh: Nasrul Hamdani

Pendahuluan

Laut dan selat yang melingkungi Aceh merupakan ruang sejarah sekaligus ‘saksi’ bagi rentetan peristiwa di negeri itu. Pengislaman Nusantara yang bermula di pesisir Pasai, penubuhan Aceh Darussalam, peleburan trah Meukuta Alam dan Dar-al-Kamal, kisah setengah dongeng yang berhubungan dengan Turki, penaklukan dan serangan ke negeri-negeri Pantai Timur Sumatera dan Semenanjung Melayu sampai kisah legendaris kapal Cakradonya berlangsung karena dan/atau berhubungan dengan kuasa negeri itu atas pesisir dan lautan di hadapannya.

Penguasaan Aceh atas bandar-bandar penting dan komoditas bernilai tinggi yang diperdagangkan di selat Melaka merupakan landasan lainnya untuk memahami kemajuan ekonomi Aceh sejak abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-19. Masa itu, selat Melaka merupakan satu simpul utama perdagangan dunia, menghubungkan para pelaut dan pedagang dari dunia Timur dan Barat bahkan sejak abad pertama Masehi. Selat ini semakin penting setelah kemunduran Mediterrania disusul munculnya bandar-dagang baru bagi pedagang Eropa di luar kawasan itu.

Aceh abad ke-16 menjadi ‘pemain utama’ dalam dinamika perdagangan di selat Melaka itu. Bandar Aceh (yang kemudian menjadi Kutaraja) selain menjadi satu simpul jaringan perdagangan lada dunia, juga menjadi pusat kendali produksi dan perdagangan lada. Penaklukan negeri-negeri di Pantai Timur dan Barat Sumatera

serta Semenanjung Melayu oleh armada Aceh dipandang sebagai kebijakan Aceh mengontrol produksi lada terutama lada hitam (*Piper nigrum*) yang bernilai tinggi.

Kisah mengenai dominasi Aceh di selat Melaka merupakan saksi dari bagaimana jalinan persekutuan, perang, perdamaian dan permusuhan antarkuasa pedagang di bandar-bandar utama di selat Melaka yang jatuh-bangun akibat peristiwa itu berlangsung. Tulisan ini memaparkan beberapa kisah dalam sejarah Aceh ‘penguasa’ selat Melaka seiring dengan jatuh dan banggunya bandar-bandar di Eropa dan Asia. Penguasaan komoditas bernilai jual tinggi menjadi kunci utama Aceh dalam membangun hegemoni negeri yang menjadi ‘Pintu Islam’ di kawasan itu.

Pindah dari Lisbon ke Melaka

Jatuhnya Melaka pada 1511 berhubungan erat dengan ‘evolusi perdagangan’ di Eropa. Semula, perdagangan di Eropa dikendalikan oleh keluarga borjuasi yang mendapatkan hak berdagang atas nama raja. Namun setelah kemunduran Mediterrania sebagai tempat pedagang Timur dan Barat bertukar komoditas akibat (salah satu) memburuknya hubungan pedagang Eropa dengan pedagang Muslim yang memasok lada, mendorong munculnya bandar-bandar baru yang menjadi *proxy* Eropa.¹

Sesudah kejatuhan Mediterrania, Venice dan Genoa di semenanjung Apenina mengambilalih fungsi bandar dagang di laut

¹ Rujuk Fernand Braudel, *The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II*, Vol. 2, New York: Harper and Row, 1972.

Tengah itu. Dua bandar yang dibangun dan dikuasai keluarga Medici sejak abad ke-14 ini tumbuh menjadi pusat perdagangan baru di Eropa yang mulai menerapkan asas kapitalisme. Pendirian bank oleh keluarga yang kemudian menjadi penguasa Florence dan Tuscany ini dipandang sebagai bentuk awal kapitalisme yang berkembang kompleks setelah pamor bandar Venice dan Genoa memudar seiring dengan perselisihan dalam keluarga besar ini.

Renaissance yang mendorong perkembangan pemikiran modern di Eropa secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi praktik merkantilisme, imperialisme, kapitalisme dan kolonialisme. Praktik ini, terutama merkantilisme dipandang lebih sesuai dengan situasi di Eropa sehingga raja bertindak sebagai pemberi modal dan berkuasa penuh atas perdagangan. Praktik inilah yang mendorong Portugis mengembangkan Lisbon sebagai bandar baru di Eropa yang memang tidak terlalu jauh dari laut Tengah dan pesisir Magribi yang dikuasai Muslim.

Kebangkitan Lisbon sebagai pengganti bandar-bandar di laut Tengah itu menjadi contoh bagaimana merkantilisme dan imperialisme padu melahirkan ‘ideologi’ *feitoria*, *fortaleza* dan *igreja* yang lebih dikenal dengan *gold*, *gospel* dan *glory*. Di sisi lain, kebangkitan Lisbon ‘memaksa’ Spanyol melakukan perundingan yang menghasilkan kesepakatan Tordesilhas, bahwa Portugis menguasai dunia di belahan Timur sedangkan Spanyol menguasai dunia di sebelah Barat. Inilah titik awal ‘perlombaan’ mencari rempah di dunia Timur.

Perang Salib yang membuat hubungan dengan pedagang Moor dan Saracen (sebutan Barat untuk Arab) memburuk, menjadi sebab lain mengapa

Portugis dan Spanyol bertekad mencari sendiri tempat asal rempah-rempah di dunia Timur. Portugis dan Spanyol yang diuntungkan dengan kejatuhan bandar di Mediterranean memandang para pelaut dan pedagang Moor itu ‘menyembunyikan’ peta menuju ‘kepulauan rempah’ di Timur. Dalam pelayaran mencari kepulauan rempah, para pelaut Moor yang tertawan dijadikan penunjuk jalan ke tempat yang dinamai al-Mulk (Maluku) itu.

Dalam sejarah Barat, pencarian ‘kepulauan rempah’ al-Mulk oleh para pelaut dari Portugis dan Spanyol dipandang sebagai titik awal penemuan dunia baru. ‘Penemuan’ India oleh Alfonso de Albuquerque (Portugis) dan Amerika oleh Christóbal Colón (Spanyol) dipandang sebagai prestasi besar kolonialis awal itu. Pada Agustus 1511 Portugis berhasil menaklukkan Melaka, bandar legendaris Melayu dalam sejarah Nusantara.

Kejatuhan Melaka yang kemudian ditata kembali dengan cara Portugis itu² menarik para penguasa bandar utama di Jawa termasuk orang Bugis dan Aceh untuk merebut kembali bandar legendaris itu. Cerita tentang Fatahillah dari Demak yang merebut Sunda Kelapa dari Portugis serta cerita tentang dua serangan armada laut Aceh atas Melaka pada 1615 dan 1629 menjadi bukti bahwa kehadiran Portugis di Melaka dan pengaruhnya dipandang sebagai masalah serius bagi Aceh yang telah menjadi patron bagi selat kawasan itu.

Aceh di Selat Melaka

Hubungan antara Aceh dengan Turki menjadi alasan lain yang mempengaruhi pandangan para penguasa negeri ini terhadap Portugis di Melaka. Perang Salib yang berlangsung sejak abad ke-11 telah membentuk pandangan

² Anthony Reid, *Charting the shape of early modern Southeast Asia*. Chiangmai: Silkworm Books, 1999., hlm. 130 & 170.

stigmatik antara pedagang Eropa yang Kristen dengan para penguasa Muslim di Nusantara yang punya pengalaman ‘menjatuhkan’ penguasa prakesultanan. Pandangan stigmatik inilah yang kerap menguatkan motivasi serangan-serangan Aceh atas kedudukan Portugis di Melaka serta negeri-negeri yang bersekutu dengan Portugis di selat Melaka.

Dua serangan besar Aceh ke Melaka yang tersebut di atas merupakan rangkaian serangan negeri itu sejak diperintah Sultan Ali Mughayat Shah (1514-1528) hingga Melaka jatuh ke tangan Belanda.³ Di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Aceh menjelma sebagai kekuatan dominan di selat Melaka. Dalam catatan Perancis, negeri ini telah menguasai Pantai Timur dan Barat Sumatera serta Semenanjung, mapan secara ekonomi dan kuat secara militer. Oleh karena itu bukan tanpa alasan jika Aceh ‘murka’ pada Portugis yang membangun emporium Barat, mempraktikkan monopoli secara terus menerus, mengutip cukai tinggi dan membatasi peran pedagang tempatan di selat Melaka.⁴

Dalam sejarah Aceh, Sultan Iskandar Muda menjadi mercu tanda masa keemasan Aceh di dunia. Masa Sultan Iskandar Muda berkuasa, Aceh telah menjadi entitas politik tunggal sesudah ‘menyatukan’ dua trah yang saling berebut kuasa. Denys Lombard, mengisyaratkan politik tangan besi sebagai kunci kejayaan Aceh masa Sultan Iskandar Muda. Sultan yang dicatat Augustin de Beaulieu, Jenderal Perancis yang berkunjung ke istana Daruddunya gampang naik darah ini

dikenang sebagai sultan yang memancing putra mahkotanya karena berzinah.⁵

Politik tangan besi sang sultan itu juga menurut Lombard merupakan pantulan sifat pemarahnya. Lombard yang merekonstruksi catatan Beaulieu menuliskan jika sultan sudah marah tidak ada yang dapat meredakan amarahnya. Oleh karena itu, penaklukan Aru (Haru), Kedah, serangan ke Siak; seteru utama di pantai Timur Sumatera, Pahang, Melaka, ‘menghukum’ Johor karena bersekutu dengan Portugis⁶ serta pengukuhan hegemoni di pantai Barat tidak dapat dilepaskan dari kombinasi sifat pamarah sang sultan di tengah perubahan konstelasi politik dan ekonomi selat karena kehadiran Portugis.

Politik tangan besi tersebut juga terlihat dari kekuatan militer Aceh. Pengalaman berperang dan menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya sejak masa awal pengislaman menjadikan Aceh sebagai negeri dengan kekuatan militer yang disegani. Kekuatan militer Aceh bertumpu pada pengalaman, adaptasi serta dukungan militer dari berbagai negeri yang menjalin hubungan dengan negeri ini, terutama dan memberikan pengaruh ialah Turki.⁷ Oleh karena itu, kekuatan militer Aceh dibangun dengan cara dan mengadaptasi teknologi Turki.

Hubungan (militer) Aceh dengan Turki ini terekam dengan baik dalam kisah Secupak Lada. Kisah ini disampaikan dari generasi ke generasi untuk menguatkan kenangan kolektif orang Aceh dan Turki. Menjelang serangan Belanda 1873, kisah tentang sekeranjang lada yang

³ Nordin Hussin, *Trade and society in the straits of Melaka: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830*. Singapore: NUS-NIAS Press, 2007.

⁴ K.N. Chaudhuri, *Asia before Europe: economy and civilization of the Indian ocean from the rise of Islam to 1570*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990., hlm. 259. Nordin Hussin, *Op.cit.*, hlm. 21.

⁵ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

⁶ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Waspada, 1981, hlm. 271-288.

⁷ Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

dipersembahkan utusan Aceh kepada Sultan Ottoman yang ‘ditukar’ meriam dikisahkan kembali untuk membangkitkan semangat bahwa kapal Turki akan segera tiba membantu Aceh menghadapi Belanda yang sudah merebut dua *vazal* di pantai Timur Sumatera yaitu Serdang dan Asahan pada 1865.⁸

Aceh yang dilindungi laut memusatkan perhatian pada pengembangan kapal-kapal perang dalam berbagai ukuran. Masa Sultan Iskandar Muda berkuasa, ada sebuah kapal legendaris yang dinamai Cakradonya. Ukuran sangat besar untuk masa itu, panjangnya 100 meter, memiliki tiga tiang layar dan dilengkapi 100 meriam. Pada serangan pertama ke Melaka, kapal yang mungkin dibangun dengan teknologi Tiongkok itu meluluhlantakkan Johor. Portugis yang terlibat dalam pertempuran laut itu menyebut kapal itu sebagai ‘kapal hantu’.

Dalam serangan kedua sekaligus terakhir Aceh ke Melaka tahun 1629, kapal besar ini berhasil ditawan Portugis sebagai pampasan perang yang kemudian dipersembahkan kepada raja. Dalam catatan Portugis, mereka terkagum-kagum menyaksikan kapal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Salah satu pelaut Portugis menuliskan kekaguman pada kapal Aceh yang besar itu dan menyebutnya sebagai *Espanto del mundo* atau keajaiban dunia.

Mengenai kapal Cakradonya juga lonceng besar yang dipajang di Museum Aceh kini, kapal itu mungkin juga ‘dihadiahkan’ untuk Aceh menyusul kabar meninggalnya Laksamana Cheng Ho pemimpin armada *Bao Chuan* (kapal harta). Diceritakan, setelah Cheng Ho meninggal seluruh kapal Tiongkok itu ditarik ke

Kolkata. Salah satu kapal Tiongkok yang merekam keadaan Sumatera sejak abad ke-14 itu mungkin sekali ‘ditinggalkan’ untuk Aceh. Pemberian itu bukan tanpa alasan. Sesudah seluruh armada berhimpun di Kolkata, Tiongkok menutup diri dan mengakhiri kegiatan penjelajahan lautan hingga 100 tahun sesudah itu.⁹

Kegagalan dua serangan Aceh atas Melaka yang dikuasai Portugis mendorong Aceh untuk semakin ketat mengontrol perdagangan di selat Melaka. Daerah-daerah di pantai Barat dan Timur yang menghasilkan lada dapat diawasi sampai penghujung abad ke-18 sampai jatuhnya harga lada dan penemuan timah. Tahun 1640 Melaka berhasil direbut Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang berkuasa di Sunda Kelapa sebagai puncak persaingan Belanda-Portugis memperebutkan pengaruh sebagai bandar paling penting dalam perdagangan rempah-rempah di dunia Timur.

Melaka di bawah kekuasaan VOC Belanda, tidak lagi penting sebagaimana di bawah kendali Portugis. Pembukaan Penang dan Singapura oleh Inggris, mempengaruhi kedudukan Melaka. Pola perdagangan abad ke-17 itu, cenderung dilakukan secara terbuka, diantara pedagang bebas Inggris atau *countrytrader* yang berani membeli harga tinggi, lebih santun dan gemar bertualang demi mencari komoditas perdagangan dari tempat-tempat baru. Persaingan Portugis dan Belanda di masa sebelum ini bergeser menjadi persaingan antara Inggris dan Belanda yang masih melihat Aceh sebagai kekuatan penting dalam konstelasi politik di kawasan itu.¹⁰

Kekuatan Aceh masih dominan di kawasan selat Melaka ketika Inggris dan

⁸ Tengku Luckman Sinar, *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang*, Medan: Yayasan Kesultanan Serdang, 2007.

⁹ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa, 2003, hlm, 28.

¹⁰ Nordin Hussin, *Trade and Society in the straits of Melaka: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830*. Singapore: NUS-NIAS Press, 2007.

Belanda berebut pengaruh. Sampai pertengahan abad ke-19 kedua kolonialis itu ‘tidak berani berulah’ dengan Aceh yang membangun sistem pertahanan laut di sepanjang pantai Timur Sumatera. Baru setelah barter jajahan; Inggris memperoleh Melaka dan Belanda mendapatkan Bengkulu, Inggris mulai bergerak maju ke daerah-daerah takluk Aceh di pantai Timur Sumatera untuk mempersiapkan beberapa pos perdagangan di Asahan, Deli, Serdang, Langkat dan Siak.¹¹

Pada 1840, Inggris telah memetakan bandar-bandar Aceh yang memasok lada bagi dua *proxy* perdagangannya di Penang dan Singapura. Di pantai Barat Sumatera, tercatat nama *Tapoos* (Tapus), *Sebadi* (Sebadeh), *Pulo Dua*, *Kalavat* (Kluet), *Telapow* (Teluk mungkin Tapaktuan), *Mucki* (Meukek) *Labuan Haji*, *Mangin* (Manggeng), *Scimeyon* (Tangan-tangan, *sic*), *Tareepuli*, *Taddow* (Kuala Tadu), *Tarang* (Kuala Trang), *Senangkan* (Seunagan), *Annalaboo* (Meulaboh, *sic*), *Pulo Ryah* (Rigaih).¹²

Di bagian Selatan pantai Barat itu tercatat bandar *Singkel* (Singkil), *Ayam Dammah* (dekat Trumon), *Terooman*, *Rambong* (Rambung), *Saluhat* (Seulukat), *Soosoo* (Susoh), *Kevala Batu* (Kuala Batee), *Bahroos*, *Tampattuan* (Tapaktuan) dan *Sama Dua* (Samadua). Bandar di Pantai Timur bagian Utara yang dicatat Inggris ialah, *Acheen* (bandar Aceh), *Pedada*

(Peudada), *Lawang* (Lawueng), *Pedir* (Pidie) yang disebut pantai sirih, *Pakan*, *Selu*, *Burong*, *Sarong*, *Murdoo* (Meureudu), *Samalangan* (Samalanga), *Passangan* (Peusangan), *Junka* (Jangka), *Teluk Shamoy* (Lhokseumawe), *Chunda* (Cunda), *Passy* (Pasai) dan *Curtoy* (Keureuto).¹³

Penutup

Laut dan selat yang menjadi penghubung Aceh dengan dunia adalah ruang sejarah bagi rentetan peristiwa di Aceh.

Cerita tentang Duta Besar Aceh Abdul Hamid yang mangkat ketika memberikan dukungan kepada Belanda dalam perang melawan Spanyol di Middleburg, hubungan dengan Turki, kapal cakrajanya, hubungan interdependensi antara para penguasa negeri itu dengan negeri-negeri Melayu di Pantai Timur serta patroli-patroli laut Aceh di pantai Timur Sumatera sejak Siak takluk terhubung oleh lautan dan teknologi Aceh di lautan

Nama Sumatera menurut banyak pendapat berasal dari kata *samudera* yang sangat lekat dengan Pasai (Pasé atau Passy) yang menjadi simpul awal pengislaman di Nusantara. Nama itu merujuk pada lautan dan pulau yang terhubung dengan sejarah dan masa depan Indonesia.

¹¹ John Anderson, *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971,

¹² John Anderson, *Acheen and the Ports on the North and East Coast of Sumatra*, London: W.M.H Allen and Co., 1840., hlm. 159.

¹³ *Loc.cit.*

Nasrul Hamdani, S.S. adalah Fungsional Umum Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

Stigma ‘Bajak Laut’ di Perairan Aceh Pada Abad XIX

Oleh: Hasbullah

Pendahuluan

Sebelum kedatangan kapal dagang ‘barat’ pada abad ke-16, di Selat Malaka dan bahkan Samudera Hindia sudah terdeteksi adanya aksi bajak laut. Bahkan pada masa Majapahit dan Samudera Pasai di Selat Malaka aksi bajak laut sudah terjadi di sana. Kedua kerajaan besar tersebut, disebutkan tidak sanggup mengatasi aksi bajak laut yang terjadi di sana pada masa kejayaannya. Namun, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, dan Samudera Pasai menjadi bagian dari Aceh pada tahun 1528, *Banda Aceh* (Bandar Aceh Darussalam) muncul sebagai pusat keramaian baru dalam sentral pelayaran dan perdagangan nusantara dan internasional sejak awal abad ke-16.¹ Dengan begitu, secara politis keamanan laut di perairan tersebut saat itu juga menjadi tanggung-jawab kesultanan Aceh, termasuk di dalam penanganan keamanan perairannya dari aksi ‘bajak laut’.

Sejak tahun 1519, Portugis telah berupaya merebut bandar Aceh, seperti yang pernah dilakukan Gaspar de Costa di Kuala Krueng Aceh. Akibatnya, Costa ditangkap Sultan Aceh, namun kemudian ditebus melalui perantara Nina Cunapam sehingga syahbandar Portugis di Samudera Pasai itu berhasil dibawa ke Malaka.² Tahun 1521, orang-orang Portugis pimpinan Jorge de Brito juga mencoba mengacau di

perairan Aceh. Namun dalam perang laut yang hebat itu de Brito tewas, sedangkan yang lainnya dikejar sampai ke Pedir (Pidie) oleh pasukan Ali Mughayat Syah. Di Pedir, sultan mengendalikan situasi dan mengkonsolidasi kekuatan Aceh, sehingga orang-orang Portugis dan Sultan Ahmad, raja Pedir terpaksa mengundurkan diri ke Samudera Pasai.³

Mereka terus dikejar pasukan Aceh pimpinan Ibrahim (adik sultan) ke Samudera Pasai. Sebelum bantuan Aru sekutu Portugis tiba di sana, pasukan Aceh terlebih dahulu menguasai Samudera Pasai. Panglima Ibrahim berhasil merebut benteng Portugis di Samudera Pasai. Peristiwa lepasnya benteng Portugis di sebelah kiri Krueng Pasai kepada Aceh sejak Juni 1521 itu adalah yang pertama kali di nusantara.⁴ Sejak saat itu, Aceh berhasil menguasai perairan pantai timur Sumatera di selat Malaka hingga pantai sebelah barat Sumatera. Namun, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, Sultan Iskandar Tsani tampaknya tidak terlalu berambisi secara politis untuk merebut Malaka yang baru jatuh ke tangan Belanda.⁵

Kemudian sultanah (raja-raja perempuan Aceh) naik tahta yang dimulai dengan penobatan Tajul Alam Safiatuddin Syah. Beliau memerintah dari tahun 1641 sampai 1675. ‘Dinasti perempuan’ berakhir pada masa sultanah keempat Sultanah

¹Banyak sumber sejarah yang menyebut demikian, di antaranya M.Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspada) 1981. Sumber lain, baik lokal maupun asing menyorot kedudukan kesultanan Aceh pada masa Sultan Ali Mughayat Syah, Alaudin al Kahhar, dan al Mukammal hingga Iskandar Muda sangat banyak meninggalkan kisah tentang keperkasaan dan kemajuan Aceh sehingga Johor, Pahang, dan Malaka pernah dikuasai Aceh sebelum

mereka berserikat dengan penjajah Portugis, Belanda dan Inggris. Hal itu menunjukkan kehebatan Aceh sebagai salah satu kerajaan maritim yang kuat di barat nusantara pada abad 16 hingga 17.

²M.Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspada) 1981, hlm.158-172

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Kamalat Syah tahun 1699. Pada masa itu, kerajaan Aceh masih kaya raya. Namun, kemudian mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya konflik internal karena perebutan kekuasaan oleh pihak laki-laki di lingkungan kerajaan ‘*Aceh Lhee Sago*’.⁶ Selain itu, kebakaran perbendaharaan kekayaan istana dan masjid raya yang diperkirakan terjadi pada masa pemerintahan sultanah ketiga Inayat Syah telah menguras perbendaharaan kekayaan sehingga kejayaan kesultanan menjadi menurun. Selain itu, politik ‘*divide et impera*’ terhadap wilayah taklukan Aceh yang sebelumnya setia kepada Sultan Aceh terus dilakukan Belanda, namun kesetiaan wilayah taklukan masih dipertahankan kepada Aceh.⁷

Sejak saat itu, aksi ‘bajak laut’ di perairan Aceh sering terjadi, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan Aceh di Bandar Aceh. Aksi-aksi ‘bajak laut’ di perairan Aceh terjadi di wilayah *nanngroe* dan *rantoe*, seperti di pantai timur Sumatera maupun pantai barat Sumatera. Akibatnya, kemudian Belanda beralasan bahwa kesultanan Aceh sudah tidak mampu lagi menjaga keamanan perairannya dari aksi-aksi ‘bajak laut’ di wilayah dan taklukannya yang telah merugikan kapal-kapal pedagang asing di wilayah-wilayah perairannya tersebut.

Munculnya Stigma ‘Bajak Laut’ di Perairan Aceh

Munculnya kepentingan asing, seperti Inggris dan Belanda terhadap wilayah taklukan ‘*nanngroe*’ dan ‘*ranto*’ mulai marak terjadi sejak abad ke-19. Mereka sama-sama mengincar kekayaan hasil bumi, seperti lada, emas dan lain-lain dari wilayah taklukan kesultanan Aceh

sehingga membuat perairan Aceh menjadi daerah rawan konflik, baik yang terjadi di Selat Malaka maupun perairan barat Sumatera, akibat munculnya berbagai tindakan perompakan yang dilakukan ‘bajak laut’. Pada saat bersamaan, di dunia maritim internasional juga muncul permasalahan yang sama. Saat itu, sistem pelayaran dan perdagangan internasional sedang ramai oleh lalu-lintas kapal dagang dari Eropa ke koloni-koloninya dan sebaliknya. Saat itu, di Samudera Hindia juga muncul aksi-aksi ‘bajak laut’, padahal sebelumnya mulai berkurang.

Sejarah kelompok bajak laut di dunia awalnya muncul dengan nama “Jolly Roger” yang dikenal hingga saat ini. Bajak laut ini, seperti kelompok Barbary Corsair di Afrika Utara yang telah menyerbu kapal-kapal Mediterania tahun 1520-1530. Kemudian muncul bajak laut ‘William Kidd’ dari Madagaskar. Selain itu, juga muncul kelompok bajak laut perempuan bernama Anne Bonny dan Mary Read di Karibia. Namun, setelah tahun 1720, aksi bajak laut mulai berkurang ketika angkatan laut Inggris telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Selat Malaka hingga perairan sebelah barat Sumatera.⁸

Pada masa Sultanah Safiatuddin Syah memerintah, ia jarang ‘*blusukan*’ sebagai kontrol hegemoni ke wilayah-wilayah taklukan. Hal ini menyebabkan penguasa-penguasa di wilayah taklukan, baik ‘*nanngroe*’ dan ‘*rantoe*’ merasa ‘renggang’ dengan kerajaan Aceh. Di antara mereka ada yang mengadakan ‘kontrak gelap’ dalam perdagangan lada dengan para pelayar dan pedagang asing di wilayahnya, yang tentu saja mengurangi pendapatan *wasee*/cukai ke pusat kesultanan Aceh.

Saat itu, wilayah perairan dan taklukan Aceh juga menjadi seperti wilayah ‘tanpa hukum’. Kelompok ‘bajak laut’

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸

<http://asal-usul.sofhaljamil.com.2010/03/asal-mula-bendera-bajak-laut-jolly.html?m=1>, diakses tanggal 2 Januari 2015

memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Mereka sering mengganggu pelayaran perdagangan dengan tindakan perompakan dan penyerangan di perairan Aceh, baik di selat Malaka maupun di sekitar Samudera Hindia.⁹

Di satu sisi, kesultanan Aceh harus mempertahankan kedaulatannya untuk mengimbangi Portugis, Inggris, dan Belanda. Sedangkan di sisi lain, Aceh juga harus mampu menertibkan kelompok 'bajak laut' yang terus bergerilya di wilayah perairannya. Namun, kepentingan kelompok bajak laut dinyatakan juga telah disusupi oleh kepentingan asing, seperti Belanda. Upaya penertiban terhadap 'penyelewengan' dan 'bajak laut' ini pernah dilakukan langsung oleh Tuanku Ibrahim ke pantai barat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah (1824-1836).¹⁰

Stigma 'Bajak Laut Asing' di Perairan Aceh dalam Folklor

M. Junus Jamil dalam "Seminar Pekan Kebudayaan Aceh II" tanggal 21-25 Agustus 1972 menjelaskan tentang "Sejarah Keberadaan Kerajaan Lamuri".¹¹ Dia menyebutkan, kerajaan Jaya didirikan oleh pengungsi kerajaan Indra Jaya yang berpusat di Bandar Paton Bie (Lhok Seudu) yang berpindah ke sebelah *Gunong Geurutee* untuk menghindari serangan bajak laut Tiongkok. Di tempat itu mereka bercocok tanam palawija, seperti; pala dan lada. Ia juga berkisah, migrasi penduduk kerajaan Jaya juga ada yang berasal dari Lamuri. Pada tahun 1024 Lamuri diserang Raja Rajendra Cola Mandala dari India. Menghadapi serangan itu, Lamuri membuat pertahanan di Mampreh dan penduduknya diungsikan ke *Glee Weueng* sehingga serangan dapat dipatahkan. Kisah itu

disusun dalam '*Hikayat Prang Raja Kula*'.¹² Setelah perang usai, terjadi pepecahan. Akibatnya sebagian wilayah dapat direbut musuh, seperti Indra Jaya menjadi milik bajak laut Tiongkok yang dipimpin Liang Khie dan Laksamana O Nga. Mereka sampai beberapa generasi menguasai Seudu atau Pantan Bie (Cantoli). Bajak laut Tiongkok yang telah menduduki kerajaan Indra Jaya menyerang kerajaan Indra Purba yang diperintah Maharaja Indera Sakti. Namun, bersamaan dengan masa itu, kerajaan Lamuri juga dimasuki bajak laut Tiongkok lainnya. Kelompok bajak laut itu dipimpin oleh perempuan bernama Nian Nio Lian Khi.

Mereka juga hendak menguasai Lamuri, namun mendapat perlawanan sehingga terjadi perang. Lamuri terdesak, namun saat itu tiba rombongan Syekh Abdullah Kan-an alias Teungku Lampeuneuen alias Syiah Hudam yang sedang berdakwah Islam ke sana.¹³ Maharaja Indra Sakti mengizinkan rombongan 'dakwah' itu menetap di Mampreh. Pemimpin rombongan, Syekh Abdullah Kan-an alias Syiah Hudam menawarkan bantuan kepada raja Lamuri untuk menghadapi serangan bajak laut itu. Tawaran tersebut diterima Lamuri sehingga kemudian terjadi perang yang dimenangkan kelompok Syiah Hudam. Pimpinan bajak laut Nian Nio Lian Khi pun berdamai dengan Syiah Hudam, lalu memutuskan memeluk agama Islam, dan begitu juga dengan pimpinan Lamuri Maharaja Indra Sakti beserta penduduknya juga memeluk Islam.¹⁴

⁹ *Op. Cit.* hlm. 498-499

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <http://atjehpost.co/m/read/118/Putroe-Neng-Antara-fakta-dan-legenda>, diakses 02 Februari 2015

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Stigma ‘Bajak Laut’ dalam Film *Rentjong Atjeh*

Stigma ‘bajak laut’ ternyata masih melekat pada wilayah perairan Aceh paling tidak sampai pada masa Hindia Belanda (1940-an). Hal itu tampak dalam visualisasi di film ‘*Rentjong Atjeh*’.¹⁵ Film ini diproduksi oleh Tahyar Idris yang dikenal sebagai The Teng Chun. Disebutkan, ia adalah seorang produser film Hindia Belanda keturunan Tionghoa. Film ini diproduksi tahun 1940, pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan bergenre laga. The Teng Chun juga menyutradarai film ini. Ia juga pemilik perusahaan film ‘Java Industri Film’ (JIF). Dalam menggarap film ini, ia dibantu oleh beberapa saudaranya. Sedangkan untuk *soundtrack* lagu film dibuat oleh komposer Mas Sardi, di antaranya lagu; ‘*Oh Ajah Iboekoe*’ (Oh Ayah dan Ibuku) dan ‘*Akoe Ta’ Sangka*’ (Aku Tak Menyangka).¹⁶

‘*Rentjong Atjeh*’ dibintangi oleh Ferry Kock, Dewi Mada, Bissoe, Mohammad Mochtar (WD Mochtar) dan Hadidjah. Pada masa pemutarannya film ini menuai sukses yang besar. Film ini mengisahkan aksi balas dendam suatu kelompok terhadap kekejaman yang telah dilakukan oleh kelompok ‘bajak laut’ di Selat Malaka. Film ini menceritakan tentang bajak laut yang beraksi di perairan Selat Malaka. Bajak laut telah membunuh seluruh awak kapal dan penumpang. Namun, di sebuah kapal ada tiga orang anak yang masih bertahan hidup, yaitu; Maryam (Dewi Mada), Daud (Mohammad Mochtar) dan Rusna (Hadidjah). Dua kakak beradik ini berhasil melarikan diri ke hutan bakau (*mangrove*). Sedangkan Maryam berhasil ditangkap kelompok bajak laut. Ia dipaksa bertahan hidup dengan kapten bajak laut yang diperankan oleh Bissoe. Lima belas

tahun kemudian, Rosna bertemu dengan Prajurit Ali yang diperankan Ferry Kock. Ali jatuh cinta kepada Rosna, sedangkan Daud abang Rosna jatuh cinta pada Maryam yang telah menjadi penari untuk kapten bajak laut. Ali dan Daud akhirnya sepakat untuk menuntut balas apa yang telah dilakukan oleh pemimpin kelompok bajak laut tersebut.¹⁷

‘*Rentjong Atjeh*’ ditayangkan pada tahun 1940 di *Theatre Samporna* Surabaya. Film ini pernah ada termasuk ‘*sound track*’ dan posternya. Selain itu, film ini pernah ditayangkan di luar negeri, seperti di *British Malaya* (Malaysia). Film ini merupakan drama sejarah kebesaran bangsa Melayu yang pertama. Dialognya menggunakan bahasa Melayu. Keberadaan film tersebut, saat ini sudah tidak diketahui lagi. Namun, itu bukan hanya terjadi pada film ini saja, banyak film-film lain Indonesia yang diproduksi sebelum tahun 1950-an sudah banyak yang ‘hilang’.¹⁸

Stigma ‘Bajak Laut’ di Pantai Barat Selatan Aceh Abad Ke-19

Pada tahun 1778 wilayah pantai barat Aceh, yaitu Barus dikuasai Belanda, namun kemudian berhasil direbut kembali kesultanan Aceh. Akibatnya lalu-lintas pelayaran perdagangan internasional di pantai barat menjadi ramai kembali. Ketika itu di sana muncul kelompok Sidi Mara yang mendukung kesultanan Aceh. Mereka sering menghalau kapal-kapal Belanda di perairan pantai barat.¹⁹

Pada tahun 1829, Sidi Mara berhasil mengusir Belanda ke Natal bahkan hingga ke Air Bangis ketika Paderi sedang

¹⁵

http://id.wikipedia.org/wiki/Rentjong_Atjeh, diakses 12 Januari 2015

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ E.B. Kielstra, *Sumatra's Westkust van 1825-1832*, BKI III, hlm.285 dan 315. Lihat juga M. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan; Waspada) 1981, hlm.498.

melakukan perlawanan.²⁰ Akibatnya selama tiga tahun Belanda tidak tampak aktivitasnya di perairan wilayah tersebut. Pada tahun 1839, benteng pertahanan kelompok Sidi Mara di Barus berhasil direbut Belanda. Namun setelah itu, berhasil direbut kembali oleh Aceh dan juga pos-pos di sekitarnya yang dikausai Belanda juga diserang mereka. Namun setelah mendapat bantuan dari Padang dan Batavia, Belanda berhasil menyerang kembali Barus, Tapus, dan Singkil. Mereka mengklaim ketiga daerah tersebut bukan bagian dari wilayah taklukan Aceh, sehingga daerah tersebut dianggap tidak terikat dengan “Perjanjian Sumatera”.²¹

Serangan ‘Bajak Laut’ terhadap Kapal Dagang Amerika di Kuala Batu

Pada 7 Februari 1831 terjadi perompakan terhadap kapal dagang Amerika *Friendship* di Kuala Batu.²² Kerajaan Aceh mengatakan serangan itu dilakukan oleh kelompok Lahuda Langkap yang difasilitasi Belanda. Namun, setelah peristiwa itu, kapal *Dolphijn* milik Belanda juga dirompak ‘bajak laut’ di Meukek. Namun Belanda tidak mau berseteru dengan Inggris, dan juga menghindari kemungkinan pecahnya perang dengan Aceh sehingga tidak berani mengambil tindakan atas serangan ‘bajak laut’ tersebut.²³

Pada tahun 1860, kapal dagang Amerika telah mengangkut lada ke Boston dengan nilai seharga 17.000.000.- dolar.

Separuhnya merupakan lada dari wilayah Aceh. Biaya pelayaran dan perdagangan yang murah serta kapal cepat milik Amerika sehingga mampu bersaing dengan Inggris dan Belanda dalam perdagangan di sana. Permasalahan ini merupakan hal lain bagi Inggris dan Belanda yang juga sama-sama sudah mengincar Aceh. Akibatnya Sultan Muhammad Syah (1823-1838) berada di bawah ‘tekanan’ Belanda dan Inggris, dan di sisi lain juga berusaha mengkaji hubungan perdagangan dengan Amerika di Aceh.²⁴

Pembajakan kapal dagang Amerika milik Silsbee, Pickman, dan Stone tersebut diduga terjadi karena pelanggaran undang-undang perdagangan kepada Inggris atau Belanda. Sebelumnya telah dibuat perjanjian perdagangan yang ditandatangani Sultan Aceh dengan perwakilan Inggris pada tahun 1819. Perjanjian itu sebenarnya dibuat untuk menyingkirkan pelayar dan pedagang Amerika dari Aceh.²⁵ Ada ketidakjelasan pelaku pembajakan terhadap kapal-kapal dagang Amerika, antara yang dilakukan ‘bajak laut murni’ dengan ‘orang tak dikenal’. Hal ini merupakan permainan politik semata, karena perebutan pengaruh pelayaran dan perdagangan internasional lada di wilayah perairan pantai barat Aceh.

Bajak laut di perairan ini disebut ‘barat’ sebagai *‘Viking of the East’* karena tidak ada satu pun pelayaran dan kapal dagang yang aman dari ancaman perompakan di sana. Kekuatan ‘bajak laut’ tersebut karena posisi pantai yang strategis

²⁰Belanda menginvasi Padang yang dilaksanakan KNIL (*Koninklijk Nederlandsch-Indiesch Leger*) yang dipimpin Jan Jacob Roeps dan Andreas Victor Michiels pada tahun 1831.

²¹Belanda menyerang Barus dari orang Aceh dengan kekuatan 700 prajurit yang dipimpin oleh Letnan Bishscoff. Bendera Aceh berhasil direbut Belanda di benteng tersebut, namun orang Aceh berhasil merebut kembali. Bishscoff sendiri mendapat tetakan 11 luka sabetan pedang di kepalanya. Orang Aceh meninggalkan senjata dan amunisinya dan segera mundur ke Tapus dan Singkil. Orang Aceh di Singkil

dipimpin oleh Muhammad Arief dan terus dikejar Belanda hingga Singkil dikuasainya sejak tahun 1840.

²²“Kuala Batu” adalah nama ‘kota pelabuhan’ pada masa lalu yang terletak di muara sungai Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Lokasinya berada di antara Gampong Pulau Kayu, tepatnya muara sungai Krueng Susoh dan Gampong Lama Tuha. Saat ini juga menjadi nama bandar udara di Kabupaten Aceh Barat Daya.

²³ *H.M. Said, Op. Cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

untuk bersembunyi dan berlindung di banyak tempat, seperti teluk dan muara sungai. Kelompok bajak laut hanya menampakkan diri ketika akan merompak secara berkelompok hingga 50 perahu dengan kecepatan tinggi. Mereka mengejar kapal dagang yang berlayar lambat karena muatan lada dan rempah yang penuh dari berbagai wilayah di perairan Samudera Hindia. Menurut mereka, ukuran perahu ‘bajak laut’ di perairan Aceh termasuk kecil, namun lajunya sangat cepat dan gesit. Perahu terdiri atas dua barisan dayung dengan layar lebar dan dilengkapi persenjataan. Ketika melakukan aksinya, mereka mengenakan ‘jubah merah’, ‘*rantee*’ (rantai), ‘*rincong*’ (‘keris’), dan ‘*rudus*’ (kelewang) yang diacungkan serta menggunakan pelontar batu api. Para ‘bajak laut’ Aceh dapat membunuh siapa saja, menyandera untuk ditebus, atau dijual sebagai budak.²⁶

Pada bulan Februari 1831, kapal dagang Amerika *Friendship* berlabuh di Kuala Batu untuk mengisi kargo lada. Kapal ini saat itu membawa 17 awak kapal dan tiba di Kuala Batu 22 September 1830, dengan kapten kapal dikepalai oleh Charles Moses Endicott. Ia sudah sering pergi-pulang antara Kuala Batu dan pelabuhan Salem dengan memperoleh keuntungan yang besar. Setelah ia memuat stok lada yang sudah tersedia, kapal masih harus menunggu panen berikutnya pada Maret dan Juni tahun 1831, sehingga mereka menyingkir ke sebuah pulau kecil yang berjarak sejauh dua mil dari sana. Namun, serangan ‘bajak laut’ kemudian terjadi ketika kapal sedang memuat lada dan Endicott ketika itu sedang berada di daratan untuk menimbang lada.²⁷

Kelompok ‘bajak laut’ menyusup di antara orang yang membawa lada dengan

perahu ke kapal. Akibat serangan bajak laut itu, lima orang awak kapal dagang Amerika terbunuh dan yang lainnya berhasil melompat ke laut untuk menyelamatkan diri.²⁸ Akibat peristiwa itu, angkatan laut Amerika membombardir empat benteng pertahanan di Kuala Batu pada 6 Februari 1832, dan 300 penduduk Kuala Batu tewas dan sebagian meloloskan diri ke pedalaman di sekitar Kuala Batee dan Lama Inong.²⁹

Serangan ‘Bajak Laut’ terhadap Kapal Dagang Amerika di Meukek

Pada 28 Agustus 1838, kapal dagang Amerika ‘*Eclipse*’ diserang oleh 24 orang ‘bajak laut tak dikenal’ di Meukek.³⁰ Serangan itu telah menewaskan kapten kapal Charles T. Wilkens. Awalnya Wilkens menyetujui permintaan kelompok ‘bajak laut’ itu untuk naik ke atas kapal, namun terlebih dulu senjata mereka di sita. Kemudian dikembalikan setelah diminta kembali oleh kelompok tersebut dan hal itu dipenuhi oleh Wilken.³¹

Beberapa saat kemudian ia ditusuk dan dibunuh oleh kelompok pembajak. Awak kapal lainnya juga diserang dan ditikam kelompok ‘bajak laut’ tersebut, tetapi mereka berhasil menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Sedangkan kapten kedua kapal ketika itu sedang berada di daratan Meukek untuk menimbang lada. Setelah peristiwa itu, awak kapal tersebut berhasil membawa kembali kapal ‘*Eclipse*’ ke Salem Boston, Amerika. Kelompok ‘bajak laut’ berhasil menjarah isi kapal tersebut sehingga menderita kerugian 26.000.- dolar, 4 peti opium, 2 peti pakaian, 2 buah jam emas, teropong dan sebagainya.³²

²⁶ *Op.cit.*, hlm.470-533

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm.530.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Raja Meukek telah memberikan bantuan kepada awak kapal Amerika, ketika menerima laporan telah terjadi serangan kelompok perompak. Namun, tindakan penyerangan ‘bajak laut’ segera dibalas tanpa menunggu perintah presiden Amerika Serikat. Komodor Reid kapten kapal perang Amerika Serikat ‘*Columbia*’ yang sedang mendekati Srilanka terus melaju ke Aceh. Ketika tiba di Meukek, kota itu langsung dibombardir dengan kekuatan 30 perwira dan 300 pasukan marinir. Beberapa jam serangan dan gempuran meriam, kota Meukek terbakar dan jatuh beberapa korban. Selain itu, kapal dagang berbendera Perancis ‘*van Yseghem*’ juga pernah dirompak oleh ‘bajak laut’ di perairan Meukek.³³ Akibatnya, Perancis juga mengutus kapal perangnya bernama ‘*La Dordogne*’ untuk melakukan serangan balasan terhadap ‘bajak laut’ Meukek pada tahun 1839.³⁴ Hal itu dimaksudkan mereka untuk menghukum ‘bajak laut’ yang bersembunyi di sana.

Penutup

Beberapa faktor penyebab maraknya aksi ‘bajak laut’ di perairan Aceh pada masa lalu, antara lain; melemahnya kontrol hegemoni pusat kerajaan Aceh di Bandar Aceh terhadap wilayah taklukan dan kekecewaan kelompok tertentu di Aceh yang sering ditipu dalam perdagangan lada

oleh para pedagang asing, seperti memanipulasi berat lada yang dijual penduduk.

Stigma ‘bajak laut’ di perairan Aceh merupakan provokasi Belanda karena Amerika dan bangsa Eropa lainnya ternyata telah menguasai sebagian perdagangan lada di pantai barat Sumatera pada abad ke-19. Kesultanan Aceh mengklaim, tindakan ‘bajak laut’ di perairannya ditunggangi Belanda yang mendanai dan mempersenjatai kapal Aceh yang telah dirampas mereka dan mempergunakan bendera kerajaan Aceh di dalam setiap aksinya.

Romantika perairan Aceh terus mengikuti dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi orang Aceh di sepanjang masa. Saat ini, perairan wilayah pantai timur Aceh yang terkoneksi langsung dengan pelayaran nasional dan internasional di Selat Malaka merupakan jalur yang masih marak dengan aksi ‘bajak laut’ dan berbagai bisnis ilegal, seperti mobilisasi orang dari dan ke luar negeri secara ilegal, *trafficking*, *illegal fishing*, *black market* dan jalur narkoba internasional. Sedangkan di pantai barat, pesisir barat selatan Aceh kini cenderung sepi dari aksi ‘bajak laut’, apalagi setelah berakhirnya era lalu-lintas KPM berakhir tahun 1950-an dan juga era legal *loging* tahun 1980-1990-an.

³³ *Ibid*, hlm. 531

³⁴ *Ibid*.

Hasbullah, S.S. adalah Peneliti Muda Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Cerita Rakyat Suku Singkil: Harmoni Manusia dengan Lingkungan Alam

Oleh: Nurmila Khaira

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah “negara kepulauan” yang penduduknya bercirikan masyarakat kepulauan. Secara garis besar, kepulauan tidak lagi diartikan sebagai sekumpulan pulau melainkan “*a body of water dotted by islands*” atau sering juga disebut sebagai “*a maritime continent*”.¹ Masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan, khususnya pada wilayah pesisir kemudian dianggap memiliki budaya maritim, yaitu perikehidupan yang memanfaatkan kekayaan dan potensi laut sebagai sumber kehidupannya.² Perikehidupan masyarakat maritim dibentuk dengan memperhatikan serta melibatkan sumber daya alam dan kebudayaan manusianya yang mampu menciptakan peradaban maritim yang tercermin dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya.³ Secara spesifik, kehidupan masyarakat maritim yang tercermin dalam sistem kebudayaan menciptakan sebuah generasi yang cinta laut dan secara penuh menyadari bahwa kehidupannya akan selalu bergantung kepada laut.

Kebudayaan merupakan suatu pola hidup yang menyeluruh, bersifat abstrak dan luas serta meliputi banyak kegiatan

manusia sehari-hari.⁴ Pada masyarakat pesisir, pola hidup yang melibatkan sumber daya laut terlihat tidak hanya pada pola interaksi antara satu anggota masyarakat saja, melainkan juga muncul salah satunya pada tradisi lisan yang bukan tidak mungkin mempengaruhi karakter individu dari masyarakat itu sendiri. Tradisi lisan dalam berbagai bentuknya yang sangat kompleks mengandung berbagai hal yang berkenaan dengan hidup dan komunitas pemiliknya seperti kearifan lokal, sistem nilai, sistem kepercayaan dan religi serta berbagai hasil karya seni.⁵ Sehingga dengan tradisi lisan, kebudayaan sebuah masyarakat pesisir dapat terbentuk dan ditransfer kepada generasi berikutnya hingga akhirnya menjadi sebuah peradaban.

Lebih jauh, tradisi lisan atau folklor merupakan suatu kerangka informal dalam masyarakat yang digunakan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan dan ditransmisikan ke dalam bentuk oral (mulut ke mulut) maupun melalui dokumentasi sejarah-sejarah lokal.⁶ Secara umum, folklor memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kerangka berpikir dan bertindak bagi masyarakat maritim dengan menunjukkan cara-cara pemanfaatan wilayah secara tradisional

¹ Wahyono Suroto Kusumoprojo, 2009, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta, Mizan Publika, hlm. 2

² Ibid.,...

³ Ibid.,... hlm. 7

⁴ Deddy Mulyana dan Jalaluddin

Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda*

Budaya, 2006, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm.25

⁵ Tengku Silvana Sinar, 2011, *Mitos Cerita Rakyat*, Medan, USU Press, hlm. 1

⁶ Ben Ford, 2011, *The Archeology of Maritime Landscapes*, USA, Pringer Science & Business Media, hlm. 271

melalui kepercayaan spritual, tradisi dan kewaspadaan terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya⁷.

Suku singkil yang pada umumnya menempati wilayah Kabupaten Singkil di Propinsi Aceh merupakan salah satu masyarakat maritim yang tinggal di pesisir (meskipun ada juga yang mendiami wilayah pedalaman). Mereka yang tinggal di pesisir ini dikatakan sebagai masyarakat maritim karena hidup bergantung dengan hasil laut yang berasal dari Samudera Hindia di bagian selatan Kabupaten Singkil⁸. Melalui perjalanan sejarah yang panjang, masyarakat Singkil saat ini merupakan kumpulan masyarakat asli (*native*) dan pendatang yang masih memegang tradisi nenek moyang utamanya melalui tradisi lisan. Tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun ini berhasil mentransfer unsur-unsur kebudayaan termasuk cerita rakyat. Cerita-cerita yang disampaikan secara berkesinambungan ini tentu saja tidak lepas dari hal-hal yang berkenaan dengan sumber daya laut dan laut itu sendiri.

Wilayah Singkil sendiri terdiri dari dua *landscapes* yaitu daerah dataran tinggi berbukit-bukit yang dibelah oleh sungai besar Sungai Singkil dan daerah pesisir yang terletak di sepanjang pantai bagian barat dari Pulau Sumatera dengan iklim tropis yang sering dipengaruhi oleh angin musim⁹. Singkil sebagai masyarakat pesisir memanfaatkan sumber daya laut sebagai bagian besar dari kehidupannya meskipun sektor-sektor lain yang juga menjanjikan telah menjadi opsi menguntungkan bagi masyarakat dalam mencari nafkah. Pada tahun 2012 saja, masyarakat Singkil sudah lebih banyak mencari penghasilan di bidang pertanian dan pekebunan khususnya sawit¹⁰.

Namun demikian, kondisi ini tidak menjadikan masyarakat Singkil sebagai masyarakat yang “lupa kacang akan kulitnya”. Nyatanya, meskipun sebagian besar tidak lagi mencari penghidupan di laut, tapi penghayatan dan keterikatan batin dengan kehidupan (me) laut tidak pernah lepas dari benak masyarakat Singkil. Hal ini terbukti dari banyaknya cerita rakyat yang tetap menyisipkan kehidupan dan kejayaan yang didapat dari kehidupan laut. Sekilas terlihat adanya harapan dari generasi tua kepada generasi muda untuk dapat memiliki mental seorang pelaut dalam mengarungi hidup yang keras seperti pepatah yang mengatakan “*pelaut yang tangguh tidak lahir di air yang tenang*”.

Singkil Negeri Pesisir

Nama Singkil telah muncul dalam catatan sejarah asing pada sekitar tahun 16 M yang ditulis oleh Tome Pires, seorang pencatat sejarah dari Portugis. Dalam laporannya, ia menulis mengenai pantai barat Sumatera mulai dari Andalas, Barus hingga untuk pertama kalinya menyebutkan kerajaan Chinquelle atau Quinchell (Singkil). Dalam deskripsi tersebut, dikatakan bahwa Singkil saat itu belum beragam, memiliki kekayaan alam damar, sutera, emas dan lada yang diperdagangkan melalui jalur laut dan digambarkan pula kerajaan ini memiliki perahu yang laju-laju dan sungai yang panjang¹¹.

Catatan sejarah lain mengatakan bahwa pada 1890 Singkil pernah diterjang gelombang air pasang yang tinggi dari lautan Hindia yang sempat menghilangkan pantai pelabuhan Singkil dari permukaan. Lalu disebutkan bahwa Singkil yang dahulu disebut Singkel dalam bahasa lokal merupakan negeri yang telah mengalami

⁷ Ibid..

⁸ <http://acehsingkilkab.bps.go.id>., diakses tanggal 17 Februari 2015

⁹ Irini Dewi Wanti et al, 2005, *Lintasan Sejarah Kabupaten Aceh Singkil*, Banda Aceh, Bappeda Kabupaten Aceh Singkil, hlm. 1

¹⁰ <http://acehsingkilkab.bps.go.id>

¹¹ *Op cit*, hlm. 16

proses asimilasi dengan para pedagang dari Timur Tengah dan penduduk suku Hindia. Asimilasi ini terjadi akibat adanya hubungan perdagangan melalui laut¹².

Posisi Singkil pada tahun 1672 hingga awal abad ke-18 menjadi sangat strategis dalam dunia perdagangan internasional. Kerajaan Singkil sebagai penghasil utama kemenyan, lada dan barus di Kesultanan Aceh kemudian diperebutkan posisinya oleh *Vareenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) Belanda yang memainkan sistem perdagangan monopoli dan *East Indian Company* (EIC) Inggris yang memainkan konsep perdagangan bebas¹³. Dengan laut sebagai jalur perdagangan, Singkil saat itu dikenal dan disejajarkan dengan Kerajaan Barus.

Singkil saat ini justru memanfaatkan laut sebagai sumber utama kehidupan khususnya bagi masyarakat nelayan. Tercatat pada tahun 2010 saja, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Singkil mencapai 4.404 ton yang meliputi penangkapan ikan tongkol, kakap, tenggiri, layaran dan udang¹⁴. Pemanfaatan kekayaan laut ini dilakukan hingga jauh ke hilir, tepatnya di sepanjang Sungai Singkil. Penduduk di Kecamatan Singkil yang sebagian wilayahnya dibelah oleh Sungai Singkil umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan sungai. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk di Singkil sangat bergantung pada hasil laut.

Ketergantungan masyarakat Singkil ini tentu sangat disadari oleh masyarakatnya. Cerita-cerita rakyat pada masyarakat Singkil adalah buktinya. Sebagian besar dari cerita-cerita tersebut berisi tentang kejayaan seseorang yang

diperoleh dengan berdagang melalui aktivitas pelayaran. Lalu banyak pula cerita rakyat yang menggambarkan seorang raja yang bijaksana dari sebuah kerajaan maritim. Begitulah sedikitnya cara masyarakat Singkil menghargai “sahabat hidup” mereka, menghargai laut yang telah memberikan penghidupan dan cara hidup yang bermanfaat dari generasi ke generasi.

Cerita Rakyat Singkil: Menyentuh Kehidupan Laut

Setiap karya sastra berupa cerita rakyat selalu erat hubungannya dengan masyarakat tempat cerita tersebut tumbuh dan merupakan ungkapan perasaan masyarakat terhadap lingkungannya¹⁵. Hubungan erat antara masyarakat Singkil dengan lingkungannya salah satunya diwujudkan dengan munculnya cerita-cerita rakyat berupa legenda dan dongeng yang dilihat dari ciri dan bentuk cerita. *Dongeng* merupakan cerita atau prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat yang memiliki cerita tersebut sehingga tidak terikat oleh waktu dan tempat sedangkan *legenda* berarti semua cerita atau prosa rakyat yang dianggap pernah terjadi namun tidak dianggap sakral atau suci bagi masyarakatnya¹⁶. Beberapa dongeng dan legenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Legenda Naga dan Tuan Tapa¹⁷

Dikisahkan pada zaman dahulu hiduplah sepasang ekor naga yang sangat sakti di Teluk (sekarang Tapaktuan, Aceh Selatan), yaitu si Naga Jantan dan si Naga Betina yang berasal dari Negeri Cina. Mereka diusir dari Cina oleh Raja karena

¹² *Ibid.*, hlm. 14

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/>. Diakses tanggal 25 Februari 2015.

¹⁵ Hariadi Susilo, 2011, *Mitos Cerita Rakyat*, Medan, USU Pres, hlm. 15

¹⁶ James Danandjaya, 2002, *Folklor Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 50

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bahauddin (67 tahun), salah satu budayawan Suku Singkil di Desa Sakup Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 25 April 2011 dalam rangka Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda oleh BPNB Banda Aceh.

tidak memiliki keturunan. Pada suatu hari, ketika tengah berjalan-jalan, kedua naga tersebut melihat ada satu titik hitam di tengah laut yang mendekati mereka. Setelah diperhatikan, tahulah kedua naga tersebut bahwa titik hitam itu adalah sebuah perahu yang ditumpangi sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak perempuan yang masih bayi. Perahu itu kemudian karam dan sang bayi perempuan hanyut. Kedua naga tersebut akhirnya sepakat untuk mengangkat bayi perempuan tersebut sebagai anak mereka. Bayi itu kemudian diberi nama Putri Bungsu. Putri Bungsu pun tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. 17 tahun kemudian, datanglah sepasang suami istri dari Kerajaan Asralanoka ke tempat kedua naga tersebut tinggal. Ternyata sepasang suami istri itu adalah orang tua si Putri Bungsu yang masih hidup. Mereka meminta kembali Putri Bungsu untuk dibawa pulang. Mendengar permintaan itu, kedua naga menjadi berang. Akhirnya terjadilah pertengkaran.

Ketika pertengkaran itu terjadi, datanglah Tuan Tapa dari tempat persembunyiannya di Gua Kalam. Tuan Tapa kemudian meminta kesediaan kedua naga untuk mengembalikan Putri Bungsu kepada kedua orangtuanya. Namun, tentu saja kedua naga tersebut menolak hingga akhirnya mereka menantang Tuan Tapa untuk berduel. Kemudian terjadilah duel yang sangat sengit diantara ketiganya. Pada akhirnya Tuan Tapa memenangkan duel tersebut dan berhasil mengembalikan Putri Bungsu kepada kedua orangtuanya.

Dalam perkelahian tersebut, si Naga Jantan terbunuh oleh libasan tongkat Tuan Tapa. Sementara Naga betina melarikan diri ke Cina sambil

memporakporandakan apa saja yang dilaluinya. Naga betina membelah pulau di daerah Bakongan (sekarang dikenal dengan Pulau Dua) dan memporakporandakan 99 pulau kecil yang sekarang dikenal dengan Pulau Banyak. Pulau Banyak sendiri merupakan gugusan dari 99 pulau yang terdiri dari pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni. Kini, Pulau Banyak merupakan daya tarik wisata bahari yang sangat potensial.

Legenda Naga dan Tuan Tapa baik langsung maupun tidak, disadari atau tidak telah membentuk kerangka berpikir masyarakat Singkil bahwa secara geografis, dilihat dari bentuk dan letak, Pulau Banyak dan daerah Bakongan merupakan bentukan akibat dari kisah masa lalu dimana terjadi pertempuran hebat antara dua naga raksasa dengan seorang alim lagi sakti. Belum lagi “bukti” nyata dari perkelahian dalam legenda muncul juga di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan berupa jejak besar menyerupai jejak kaki manusia di tebing pinggir laut yang diyakini masyarakat sebagai jejak kaki Tuan Tapa saat menghadapi perlawanan keras dari para naga. Hingga saat ini, Legenda Naga dan Tuan Tapa masih sangat populer di masyarakat Singkil.

2. Dongeng Raja Patukal¹⁸

Pada suatu hari,hiduplah seorang raja bernama Raja Bangsawan dan istrinya bernama Permaisuri Sri Banun di Kerajaan Patukal. Raja Bangsawan memiliki seorang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki dengan nasib yang berbeda. Saudaranya yang laki-laki adalah orang yang miskin, sementara saudaranya yang perempuan

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Mu'alim Sibro (64 tahun), anggota masyarakat yang dituakan di Desa Takal Pasir Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 7 September 2013 dalam rangka Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda oleh BPNB Banda Aceh.

adalah istri dari seorang raja yang kaya raya.

Di masa Raja Bangsawan, negeri tersebut makmur dan sejahtera serta aman. Namun, lebih kurang 10 tahun kemudian, kerajaan tersebut diambil alih oleh adik ipar Raja Bangsawan dari negeri seberang. Dalam kekuasaannya, negeri perlahan-lahan menjadi semrawut. Raja tersebut dipandang masyarakat sebagai raja yang tamak. Raja Bangsawan dan istrinya dibuang ke pulau seberang untuk diasingkan. Tidak lama, raja lalim tersebut meninggal. Orang-orang yang setia terhadap Raja Bangsawan menyelamatkan Raja Bangsawan dan istrinya.

Setelah selamat, tibalah rasa benci Raja Bangsawan kepada adik perempuan dan suaminya yang dianggap telah mengkhianati. Untuk membalas perbuatan adik iparnya, sang adik perempuan akhirnya diasingkan ke pulau seberang. Dalam kondisi tengah hamil, entah bagaimana caranya, adik perempuan raja mampu bertahan hidup meski tak tentu makan dan minum. Dengan kebesaran Allah, mereka bisa hidup.

Kemudian, bertahun-tahun kemudian, Raja Bangsawan mengadakan pesta besar untuk meresmikan pernikahan anak laki-lakinya. Diundanglah seluruh masyarakat sampai ke luar desa. Kemudian, sang raja teringat pada adiknya yang tinggal di pulau. Maka raja dan istri berangkat ke pulau tersebut untuk mengundang sang adik. Namun, raja meminta sang adik untuk tidak membawa anaknya yang sudah beranjak dewasa. Sang anak mengizinkan, namun berpesan, "Sesampainya mamak di tempat pesta, mintakan aku kulit kerbau selebar tapak tangan untuk menjadi kenang-kenangan hidupku." Adik perempuan raja akhirnya berangkat memenuhi undangan abangnya yang seorang raja. Kemudian, ia pulang

dengan membawa titipan sang anak yaitu kulit kerbau. Gembira hati sang anak melihat kulit kerbau tersebut. Sang anak kemudian menjemur kulit kerbau tersebut bertahun-tahun.

Suatu ketika, sang anak yang sudah beranjak dewasa mohon pamit kepada ibunya untuk mencari nafkah hidup. Setelah 1 bulan, dalam perjalanannya mencari naskah, didengarnya suara seseorang. Dipanggilnya orang tersebut, namun orang tersebut lari. Rupanya orang-orang tersebut membawa barang curian satu peti. Karena takut, mereka meninggalkan peti tersebut di tengah hutan. Sang anak kemudian menemukan peti tersebut lalu diambilnya peti dan dikuburkannya. Ia melanjutkan perjalanannya kembali. Beberapa bulan kemudian, tanpa hasil dari perjalanannya mencari nafkah, sang anak kembali pulang ke rumah ibunya. Ditengah jalan, ia teringat akan peti yang dulu pernah ia kuburkan. Setelah menemukan peti tersebut, dibukalah dan diketahui berisi emas. Diambilnya sedikit.

Sesampainya di rumah, sang anak menceritakan kisah perjalanannya. Berita tersebut pun menyebar luas di masyarakat dengan cepat. Kemudian, sampailah berita tersebut kepada raja, paman dari anak laki-laki tersebut. Raja pun langsung menjumpai ibu dari anak laki-laki tersebut yang tak lain adalah adiknya sendiri.

"Saya dengar anakmu merantau. Apa yang dia bawa, dik?" tanya raja kepada adiknya.

"Ada emas, bang. Sewaktu ia pergi merantau. Yang ia bawa dari rumah adalah kulit kerbau yang saya bawa dari rumah abang dulu. Tapi saat pulang, ia membawa emas". Jawab sang adik.

Sang raja akhirnya meminta untuk bertemu si anak laki-laki tersebut. Raja kemudian bertanya kepada

“Sewaktu kamu pergi, apa yang kau bawa?”, “Cuma kulit kerbau yang diminta mamak dari paman. Kemudian dengan cara tukar menukar, kulit ditukar dengan emas”, jawab sang anak. “Masih adakah orang mau beli kulit kerbau? Tanya raja. “Ada, masih paman”, jawab sang anak. “Jika kupotong kulit kerbau 20, bagaimana?” tanya raja. “ Terserah pada paman” jawab sang anak laki.

Kemudian datanglah kapal dari kerajaan lain untuk membeli kulit kerbau. Sang raja menyiapkan 20 kerbau untuk dikuliti, dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Sang raja kemudian berangkat menjumpai pembeli kulit kerbau. Naiklah ia ke kapal. Sesampainya di kapal, raja menawarkan kulit tersebut.

“Kami tidak lagi menerima kulit kerbau karena kapal kami sudah penuh muatannya” jawab sang pemilik kapal. Karena malu, raja membawa pulang kulit tersebut dan berangkat ke laut untuk membuang kulit kerbau. Sementara itu, sang anak membeli pohon kelapa dan dibakarnya pohon tersebut. Arangnya dimasukan kedalam goni dan dibuang di hutan. Sambil pulang, ia mengambil sedikit emas yang dikuburkannya dan dibawa pulang ke kampung. Berita sang anak membawa emas kemudian sampai ke telinga raja. Raja kemudian mencari sang anak untuk menyelidiki kebenaran bahwa arang batang kelapa berharga seharga emas.

“Benar paman” jawab sang anak. Kemudian ,sang raja kembali ke kerajaannya dan ditebangnyalah batang kelapa sebanyak-banyaknya, dibakar dan dimasukkan dalam goni. Tiba-tiba terdengar lagi ada orang yg membeli arang kelapa. Setelah dikumpulkan, sang raja menaikan arang tersebut ke kapal orang tersebut. Ditawarkannyalah arang ini. “Arang kami sudah cukup dan muatan kapal kami sudah penuh” jawab sang empunya kapal. Malu, raja

kemudian membuang arang ke laut. Sementara itu, sang anak sudah memiliki rumah beserta pecah belah. Kemudian ia membakar rumahnya. Arang rumah tersebut lalu disimpannya dalam hutan dan dikuburkannya sambil kemudian membawa pulang peti emas yang dulu pernah ia kubur. Lagi-lagi, berita tersebar lagi sampai ke telinga raja.

“Dari mana emas itu kamu dapat?” tanya raja. “Ada orang yang mau membeli arang rumah dan alat pecah belah.” Jawab sang anak. Raja kemudian pulang dan membakar rumahnya sendiri beserta pecah belahnya. Arangnya dikumpul dan dimasukan dalam goni dan dimuat dalam kapal. Kemudian ditawar-tawarkannya arang ini. Sang Raja tak panjang pikir, kemudian membuang arang tersebut ke laut karena tak laku. Ia kemudian pulang kembali ke kampungnya.

Sesampainya di kampung, raja terenyak. Ia sudah jatuh miskin. Beberapa hari kemudian, raja bermusyawah dengan istrinya. Kesimpulannya, mereka akan berangkat ke pulau yang sangat jauh untuk menghindari malu. Kemudian mereka pun tinggal di pulau tersebut. Sementara sang anak semakin kaya dan jaya. Karena sudah jaya, sang anak ingin menikah. Datanglah sang ibu yang langsung menikahkannya dengan anak seorang tukang gembala jawi (jenis lembu) bernama Nur Syarifah. Setahun kemudian, diangkatlah sang anak lelaki tersebut menjadi raja karena dianggap sebagai sosok penolong, membantu yang lemah dan tidak mengaharapkan imbalan. Akhirnya, mereka menjadi sepasang raja dan ratu.

Dongeng Raja Patukal menyinggung kehidupan melaut dari seorang raja yang dilakukannya untuk memperkaya dirinya. Makna dari dongeng ini sesungguhnya adalah bahwa

manusia tidak boleh tamak, mencoba melakukan segala cara agar hartanya bisa lebih dari orang lain. Namun, dibalik itu tersisip sebuah imajinasi bagi pendengarnya bahwa melakukan perdagangan melalui laut bisalah menjadi sebuah cara dalam mencari rezeki. Imajinasi lain mengarah kepada pembentukan kerangka berpikir bahwa di seberang laut sana tentulah ada kehidupan dan kehidupan tersebut mungkin bisa memberikan rezeki lebih bagi hidup seseorang.

Dongeng ini juga menjadi salah media yang bisa membentuk kerangka bertindak bagi masyarakat. Keyakinan bahwa rezeki bisa didapatkan meski dari tempat yang jauh sekalipun mendorong tindakan untuk berani merantau, mencari ilmu atau rezeki di tempat yang jauh dari kapung halaman. Secara spiritual, masyarakat Singkil asli yang seluruhnya beragama Islam meyakini bahwa Allah SWT telah menebar rezeki di seluruh muka bumi dan tugas manusialah untuk mencari dan mengusahakannya sesuai dengan firman Allah SWT “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (QS. Al-A’raf (7): 10).

3. Dongeng Jin Laut dan Dua Nelayan¹⁹

Suatu hari, Pak Lukman dan Pak Salihin pergi memancing. Ketika mereka berangkat memancing dan tiba di titik tempat memancing, hari masih siang dan terik, tidak ada mendung. Tiba-tiba saja Pak Lukman merasa ada yang ganjil, bulu kuduknya meremang. Ia merasakan suasana di Laut Ujung Raja tersebut memang menyeramkan. Ketika itu lah mereka

melihat perahu lain tiba-tiba muncul entah darimana datangnya. Ada dua orang yang sedang duduk diatasnya namun Pak Lukman dan Pak Salihin tidak bisa melihat wajah keduanya. Teringat akan ajaran para orang tua terdahulu bahwa tidaklah boleh menyapa perahu yang tiba-tiba muncul dan tidak dikenali. Pantang katanya. Lalu perahu yang tidak dikenal tersebut pun menghilang di kejauhan.

Mencoba untuk tidak menghiraukan apa yang terjadi pada hari sebelumnya, Pak Lukman dan Pak Solihin pergi untuk memancing lagi di laut pada malam hari berikutnya. Saat mereka tiba di tengah laut dan mulai memancing, laut tenang bercahaya terkena sinar bulan. Namun tiba-tiba angin kencang berhembus. Langit yang semula diterangi bulan tiba-tiba menjadi gelap. Tidak enak perasaan, Pak Lukman segera memasang layar dan bersiap untuk berlayar kembali ke pantai. “Arahkan ke Pulau Pisang, pak!” sahut Pak Solihin ketakutan.

Dalam usaha mereka menuju pulau pisang, angin dan gelombang semakin menjadi-jadi. Dan mendadak sebuah perahu lain menampakkan dirinya tepat di hadapan mereka. “Tabrak! Jangan ragu, pak!” kata Pak Solihin lagi. Namun ketika ujung kedua perahu hampir bersentuhan, perahu asing tersebut menghilang. “Lenyap! Itu bukan perahu.” kata Pak Lukman terkejut. Pulau Pisang yang telah terlihat dan tampak dekat terasa seperti masih jauh. Pak Lukman dan Pak Solihin pun pasrah. Dalam keadaan menggigil, pucat dan kedinginan kedua nelayan tersebut pasrah.

Saat laut kembali tenang, Pak Lukman merasa bahwa perahunya telah kandas, tiba di daratan. Takut terkena tipuan jin laut tersebut, pelan-pelan Pak lukman menusukkan alat pancingnya ke

¹⁹ Bardasnyah, 2002, *Cerita Rakyat dari Singkil*, Singkil, Dinas Pariwisata Aceh Singkil, hlm. 7

bawah perahu. Dan betul saja, pancing tersebut menusuk pasir. “Alhamdulillah, kita sampai di Pulau Pisang. Kita selamat.” Kata Pak Lukman. Ketika batin sudah lagi tidak ketakutan dan siap untuk pulang, mereka pun akhirnya kembali pulang ke kampung. Tidak ada kejadian apa pun dalam perjalanan mereka pulang. Akhirnya mereka kembali pulang dengan selamat. Pagi hari berikutnya mereka tetap pergi ke laut mencari ikan. Seperti kebiasaan yang dilakukan penduduk sekitar, mereka menjadi terbiasa dengan kehadiran jin laut yang muncul dan menghilang secara tiba-tiba itu.

Dongeng Jin Laut dan Dua Nelayan merupakan dongeng yang masih populer pada masyarakat Singkil. Cerita ini populer bagi anak-anak karena ada kesan mistis yang direpresentasikan oleh sang jin. Pesan yang ingin disampaikan cerita ini adalah pengalaman dan pengetahuan akan memudahkan cara mengambil tindakan; bahwa pengetahuan yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar dan tepat²⁰. Secara spritual, cerita ini membentuk kerangka berpikir masyarakat Singkil bahwa manusia hidup berdampingan dengan yang ghaib (jin) dan dalam kehidupan ada kekuatan yang lebih tinggi yang berkehendak yaitu Allah SWT. Keselamatan kedua nelayan yang sudah “diganggu” oleh jin adalah kehendak Yang maha Kuasa sehingga ketika terbentuk sebuah kerangka berpikir jika seseorang pergi untuk mencari ilmu atau rezeki lalu ia meninggal, maka itu adalah kehendak-Nya; bukan kesialan, bukan pula kesia-siaan.

Keyakinan bahwa ada Allah SWT Yang Maha Berkehendak dan kepercayaan bahwa manusia hidup berdampingan dengan yang ghaib juga membentuk kerangka bertindak masyarakat melalui tradisi kenduri laut yang dalam istilah lokal Singkil disebut *kendukhi turun ka laot*. Kenduri dilaksanakan untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar kegiatan melaut sepanjang tahun tersebut dan hasilnya mendapatkan ridha-Nya selain juga untuk mensyukuri aktivitas dan hasil melaut tahun sebelumnya.

Penutup

Cerita rakyat sebagai kerangka informal dalam menyampaikan pengetahuan, keyakinan dan kejadian pada masa lalu dalam sebuah masyarakat merupakan salah satu wujud kebudayaan yang seringkali dianggap tidak penting dan “besar” maknanya sehingga sering dilupakan. Padahal, melalui penghayatan dan imajinasi yang tepat, sebuah cerita mampu menggerakkan manusia untuk berpikir dan bertindak. “Cerita rakyat suara rakyat”, begitulah Nurhayati Rahman, seorang akademisi dan filolog, menggambarkan kekuatan cerita rakyat. Dengan cerita rakyat, masyarakat Singkil bisa menyuarkan pengetahuan, keyakinan dan sejarahnya dari generasi ke generasi sehingga pengetahuan akan cara hidup untuk dapat berdampingan baik dengan lingkungan tempat tinggalnya bisa menjadi sebuah harmoni yang indah.

²⁰ *Ibid*, hlm. 11

Nurmila Khaira, S.S. adalah Fungsional Umum Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

Mengenal “Alat Tangkap” Nelayan Tradisional di Pesisir Timur Sumatera Utara

Oleh: Fariani

Pendahuluan

Nenek moyangku seorang pelaut
Gemar mengarung luas samudera
Menerjang ombak tiada takut
Menempuh badai sudah biasa

Angin bertiup layar terkembang
Ombak berdebur di tepi pantai
Pemuda berani bangkit sekarang
Kelaut kita beramai-ramai.....

Potongan lirik dari lagu di atas mengingatkan bahwa kita hidup di negara maritim yang dikelilingi oleh hamparan laut yang luas. Hal tersebut patut kita banggakan bahwa tanah air kita adalah tanah air yang kaya akan kekayaan alam, di antaranya adalah kekayaan alam laut yang beraneka ragam.

Laut merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Orang yang hidup sekitar pantai/laut umumnya menggantungkan hidupnya pada hasil laut dan biasa dikenal dengan sebutan nelayan. Nelayan adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada laut, yang kesehariannya dihabiskan di laut dengan tujuan menangkap ikan ataupun hasil laut lainnya dengan melawan berbagai rintangan dan hambatan di laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan sumber pendapatannya nelayan terbagi empat kelompok, yaitu :¹

- Nelayan tetap atau nelayan penuh, yaitu nelayan yang pendapatan seluruhnya berasal dari perikanan
- Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari perikanan
- Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari perikanan
- Nelayan musiman, yaitu orang yang dalam musim-musim tertentu saja aktif sebagai nelayan

Selain pembagian nelayan menurut pendapatan, juga terdapat beberapa pembagian lainnya tentang nelayan, seperti berdasarkan status (pemilik/buruh) juga berdasarkan alat tangkap (tradisional/modern). Namun apapun pembagiannya, tugas utama dari nelayan adalah mencari atau menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan melawan berbagai tantangan di lautan lepas untuk mendapatkan ikan atau hasil tangkapan yang sesuai dengan harapan.

Begitu juga halnya dengan laut yang ada di Sumatera Utara, khususnya Pantai Pesisir Timur. Pantai Pesisir Timur Melayu, terutama masyarakat yang tinggal

¹ Leo Marbun (ed). Masyarakat Pinggiran yang kian terlupakan. KOMPALINDO, JAI.A.2002:20

di sekitar pantai Pesisir Timur Sumatera Utara seperti Asahan, Deli Serdang dan Langkat. Masyarakat Pesisir Timur mayoritasnya suku Melayu dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Dalam melakukan aktivitas kesehariannya, para nelayan tradisional yang ada di Pesisir Timur tersebut biasanya menggunakan alat dan teknologi tradisional.

Teknologi alat tangkap dari nelayan yang ada di Sumatera Timur biasanya dibuat oleh para nelayan sendiri sesuai dengan kepentingannya. Teknologi tradisional yang diciptakannya dengan menggunakan dan memanfaatkan hasil alam yang ada disekitar lingkungannya. Alat tangkap yang dihasilkan adalah alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut lainnya. Seperti beberapa alat tangkap yang akan diuraikan secara singkat dalam tulisan ini.

Alat Tangkap Nelayan Tradisional Pesisir Timur

Nelayan Pesisir Timur yang mayoritas masyarakat Melayu pada masa dulu dan sampai saat ini masih menggunakan alat tangkap tradisional, sesuai dengan adat istiadat Melayu alat tangkap yang digunakan untuk tidak mengganggu lingkungan, baik di darat maupun di laut dengan harapan untuk kelangsungan hari depan cucunya.

Ketika kita berbicara tentang nelayan tradisional, berarti bicara tentang aktivitas nelayan yang dilakukan secara tradisional. Segala peralatan yang digunakan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan di laut biasanya dengan menggunakan alat dan perlengkapan yang sederhana, seperti jaring dan jala. Kesederhanaan itu pula yang membuat nelayan tradisional selama ini tidak dapat memanfaatkan kekayaan laut secara

maksimal, sehingga kehidupan nelayan tradisional jauh dari kemakmuran atau masuk dalam kategori masyarakat miskin.

Adapun alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional Pesisir Timur adalah sebagai berikut:²

- **Tangkal**

Merupakan alat tangkap yang digunakan di sungai dan di rawa-rawa untuk menangkap kepiting. Alat ini terbuat dari dua buah bambu yang diikat bagian tengahnya sehingga berbentuk silang bagian tiap ujung bambunya diikat saling berhubungan yang kemudian berbentuk kubus dan terdapat jaring dibawahnya (seperti Tangkok). Setiap ujung bambu dipasang pemberat dan umpan yang diikat silang dibagian bawah bambu.

- **Ambai**

Merupakan sejenis alat tangkap yang berbentuk kantong besar, memiliki mata jaring yang rapat (1 mata – 1 inci) yang dipasang di sungai sewaktu air pasang surut yang diikat pada 2 buah tiang kayu agar tidak hanyut dan menghadap air surut (menadah ke air surut).

- **Tuamang**

Sejenis jaring yang memiliki mata jaring yang rapat dan mempunyai panjang kira-kira 60 meter dan cara kerjanya; dua orang memegang pangkal dan ujung jaring (turun ke laut yang tidak dalam), sedangkan perahu menggiring ikan samba memukul kayu ke air laut. Kemudian kedua orang tadi saling merapat dan naik ke perahu sambil menarik jaring tersebut.

- **Rawai Senggol**

Merupakan mata pancing yang diikat sepanjang kira-kira 45 cm, dan diikat kembali ke tali yang lebih besar dengan jarak 1 mata pancing dengan mata pancing

² Tuanku Lukman Sinar Basyarsyah II. USU Pres. Medan 2002 : 105

yang lainnya sekitar 35 cm. Rawai ini dipasang di laut dengan wilayah tangkap maksimal 12 mil dari pinggir pantai.

- Rawai Umpan

Rawai umpan sejenis mata pancing yang diberi umpan diikat dengan panjang kira-kira 50 cm. Rawai tersebut diberi pemberat dan diikat pada tali yang lebih besar sepanjang kedalaman laut dan juga diberi pelampung (1 rawai 1 tanda pelampung) wilayah tangkapan 9 hingga 12 mil.

- Bubu (Lukah)

Alat tangkap yang berbentuk tabung, terbuat dari bambu mempunyai 2 alat perangkap berbentuk kerucut. Di tengah tabung ada umpan di dalamnya. Di belakang tabung terdapat tutup kerucut. Kerucut tutup ini sebagai alat untuk mengeluarkan kepiting dan ikan dari bubu. Bubu di pasang di sungai juga di rawa sebelum air laut pasang. Pada bubu terdapat empat alat penjepit disisi kiri dan kanan yang diikat ke kayu supaya tidak hanyut terbawa arus. Hasil jerat diambil sesudah air surut.

- Jaring Apolo

Jaring ini mempunyai panjang sekitar 45 meter yang mempunyai tiga mata jaring dengan jenis jaring udang, ikan dan kepiting. Sewaktu melabuh pangkal jaring diberi tanda pelampung atau bendera. Ujungnya diikat dengan tali sepanjang 5 meter dan diikat ke perahu jaring. Jaring diangkat kira-kira 30 menit sekali dengan wilayah tangkapan 2 mil dari pantai dan maksimal 9 mil dari pinggir pantai.

- Belat

Perangkat ikan yang terbuat dari bambu diraut dan dijalin dengan rotan dengan jarak 1 inci. Belat ditancapkan dari pinggir pantai ke tengah laut sepanjang 45 meter. Diujung alat perangkap yang berbentuk segitiga serta dilengkapi dengan

perangkap yang lain berbentuk segitiga juga, yang sekelilingnya dipagar dengan jalinan bambu yang rapat yang berjarak 1,5 cm. belat juga diperkuat dengan banyak batang bambu agar saling berhubungan. Alat ini diambil hasilnya setiap air laut sedang surut.

- Belatjang

Alat tersebut cara kerjanya hamper sama dengan belatjang, akan tetapi cara penggunaannya yang berbeda, yaitu sejenis jaring yang mempunyai panjang kira-kira 200 meter. Cara kerjanya jaring dilemparkan di daerah yang banyak ikannya sewaktu air sedang pasang. Pangkal jaring diikat pada sebuah patok kayu dipinggir pantai. Kemudian ujung jaring juga diikat pada kayu dipinggir pantai. Hasil dari belatjang ini diambil ketika air laut surut.

- Jaring Bawal

Alat ini berupa jaring yang khusus menangkap ikan dengan mata jaring yang berukuran 1 mata 5 inci. Panjang jaring bawal ini 2,5 mil dari pinggir pantai dan maksimalnya kurang lebih 7,5 mil dari pantai.

- Jaring Kepiting

Alat tangkap ini berupa jaring yang mempunyai panjang kurang lebih 4 km dengan 6 kepala jaring yang khusus mencari kepiting. Wilayah tangkapannya maksimal 6 mil dari garis pantai.

- Acar Pancing Tengah

Alat ini merupakan mata pancing yang diikat sepanjang 30 cm dan diikat kembali ke tali pancing yang lebih besar. Jumlah mata pancing yang diikat sebanyak 10 mata pancing dalam satu pancing, sedangkan umpannya terbuat dari tali plastic yang diperhalus dan ditarik dengan menggunakan perahu dengan wilayah tangkapan maksimal 10 mil dari pantai.

- **Langgai**

Alat tangkap ini berbentuk tangguk dengan ukuran yang lebih besar dengan mata jaringnya 1 mata 1,5 cm. Wilayah tangkapan dari langgai ini 100 meter dari pinggir pantia dengan kedalaman air maksimum 1,5 meter.

- **Pancing Tengah**

Sebagai alat tangkap dengan tiga mata pancing yang diberi umpan diikat sepanjang 20 cm, dan diikat lagi pada sebuah kawat baja (ranggong). Di pangkal kawat terbuat 2 buah mata pancing yang diikat juga pada kawat baja diantara ujung dan pangkal terdapat pemberat yang terbuat dari timah dan tali pancing dengan wilayah tangkapan 9 sampai 12 mil.

- **Jaring Belanak**

Jaring tersebut merupakan jaring yang khusus digunakan untuk menangkap ikan belanak, yang mempunyai 4 panjang kepala jaring belanak kira-kira 216 meter anjangnya dan ukuran mata pancing 1,2 inci. Jaring belanak ini memiliki wilayah tangkapan maksimum sejauh 3 mil dari pinggir pantai.

- **Jaring Gembung**

Sebagai jaring yang digunakan khusus untuk menangkap ikan gembung. Memiliki 4 kepala jaring dengan panjangnya sekitar 220 meter. 1 mata jaring 2 inci. Wilayah tangkapan dari jaring ini mencapai 3 mil dari pantai.

- **Jaring Udang**

Alat tangkap ini khusus digunakan untuk menangkap udang, sama halnya dengan jaring belanak dan gembung, jaring udang juga memiliki 4 kepala jaring udang dengan ukuran 300 meter. Wilayah tangkapan maksimum 4,5 mil dari bibir pantai.

Seperti itulah alat tangkap yang sampai saat ini masih sering digunakan oleh nelayan tradisional di daerah pesisir Sumatera Timur. Kondisi terkini dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, peralatan nelayan juga semakin mengalami kemajuan. Sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat ini nelayan sudah mulai menggunakan peralatan yang canggih untuk mengambil sumberdaya laut.

Penutup

Laut menyediakan segala kekayaannya yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Nelayan menggantungkan hidupnya pada laut sebagai penangkap ikan dilaut. Mereka dapat hidup dengan cara menangkap dan mengolah ikan sebagai hasil tangkapannya.

Sebutan untuk nelayan terbagi lagi, ada yang disebut sebagai nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional dengan kemampuan alat tangkap yang sangat sederhana, sementara nelayan modern menggunakan alat tangkap yang modern. Sehingga nelayan tradisional jauh lebih tertinggal dari nelayan modern, terutama dalam hal hasil tangkapan yang diperoleh.

Sesuai dengan sebutannya, nelayan tradisional dengan ketradisionalannya dan nelayan modern dengan kecanggihannya, maka hasil tangkapannya pun akan jauh berbeda, yang akhirnya berbeda pula dalam tingkat ekonomi dan kesejahteraannya.

Awalnya alat yang digunakan oleh nelayan tradisional adalah alat buatan sendiri sesuai dengan kebutuhan di laut dengan memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya seperti jaring dan jala yang ramah lingkungan, tidak merusak ekosistem laut dengan konsekuensi tangkapan yang seadaanya.

Penggunaan alat tangkap tradisional lebih aman dan tidak merusak alam laut jika dibandingkan dengan alat tangkap modern. Saat ini, praktek penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan sepertinya sudah mulai kurang memperhatikan kelangsungan kehidupan alam laut, dengan tujuan utama hasil tangkapan maksimal dan untung yang besar.

Kedepan sebaiknya setiap nelayan memperhatikan alat yang digunakan apakah ramah lingkungan atau malah merusak, karena akan merugikan semua pihak, terutama masyarakat nelayan tradisional yang menggantungkan kehidupannya pada laut demi masa depan anak cucu kita berikutnya.

Fariani, S.Sos. adalah Fungsional Umum Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
--

Nasib Pukat Tradisional di Era Reformasi

Oleh: Essi Hermaliza

Pendahuluan

Dalam budaya masyarakat Aceh di wilayah pesisir, laut dapat memberi penghidupan. Banyak di antara masyarakat menggantungkan hidup dengan cara melaut. Mereka menggunakan peralatan baik teknologi tradisional maupun modern. Satu di antara teknologi tersebut adalah alat penangkap ikan yang dikenal dengan nama pukat.

Pukat terbilang teknologi yang sudah cukup tua, sudah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu. Pukat dapat didefinisikan dengan jaring atau jala besar dan panjang untuk menangkap ikan.¹ Pukat merupakan alat yang tidak dapat digunakan secara individu. Diperlukan sejumlah orang yang terlibat dan/atau peralatan khusus, terutama untuk mendaratkan hasil tangkapan dari laut. Pukat memiliki bermacam-macam bentuk sesuai kebutuhan dan target tangkapan, ada pukat harimau, pukat payang, pukat petarang, dan lain-lain.

Pukat belakangan ini menjadi isu nasional setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, mengeluarkan Peraturan Menteri Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut mendapat reaksi dari masyarakat nelayan di Indonesia. Hampir semua media massa, baik cetak maupun elektronik memberitakan efek dikeluarkannya peraturan tersebut. *Tempo* edisi 12 Februari 2015 mengeluarkan reportase bertajuk Larangan Pukat Dinilai

Untungkan Nelayan Besar dan tajuk senada Menteri Susi Diprotes Nelayan Soal Larangan Surat kabar *Serambi Indonesia* edisi 11 Februari 2015 juga memberitakan Nelayan Aceh keluhkan Kebijakan Menteri Susi. Di Aceh Tamiang, nelayan-nelayan tidak berani melaut karena takut mengalami hal serupa yang dialami nelayan asal Idi, Aceh Timur, karena kedapatan menggunakan pukat *trawl*, ada pula yang berhenti melaut.²

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan di Indonesia, termasuk di Aceh. Aceh memiliki luas wilayah perairan laut seluas 295.370 km², yang terdiri dari laut wilayah (perairan teritorial dan perairan kepulauan) 56.563 km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 km². Aceh juga memiliki panjang garis pantai 1.660 km. dan 800 km di antaranya pernah rusak akibat tsunami, termasuk kerusakan 14 unit dermaga dan 20.000 ha lahan pertambakan masyarakat. Dengan luas wilayah dan potensi kelautan Aceh tersebut, sebuah kewajaran apabila 164.080 orang (4,07%) penduduk Aceh menggantungkan hidup pada sektor perikanan, baik sebagai nelayan, pedagang, dan buruh lainnya. Secara spesifik pada tahun 2007 tercatat 65.886 orang masyarakat Aceh berprofesi sebagai nelayan tetap dan tidak tetap, yang terkonsentrasi di 17 kabupaten/kota, jumlah ini mengalami peningkatan 2,2% dari tahun 2006 (63.062 orang). Sebagai tambahan, di Aceh Utara terdapat 27 kecamatan di mana delapan di antaranya berada di pesisir dengan jumlah nelayan di kabupaten

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.kbbi.web.id/pukat>

² Nelayan Aceh Keluhkan Kebijakan Menteri Susi, *Serambi Indonesia*, Edisi 11 Februari 2015.

tersebut mencapai 5.222 orang (1,6%) penduduk (493.670 orang). Sementara Bireuen, 12 dari 17 kecamatan di antaranya merupakan kecamatan pesisir, dengan jumlah nelayan 9.121 orang, atau 2,6% dari jumlah penduduk (351.835 orang).³ Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan ini bahkan menjadi faktor penentu munculnya profesi baru untuk menunjang aktivitas mereka, di antaranya adalah *Panglima Laot*, *Utoh Peraho* Aceh dan *Muge Eungkot* (pedagang ikan).

Fakta di atas melatarbelakangi penulis untuk menganalisis keberadaan pukot di Aceh, bagaimana nilai-nilai luhur yang melekat dalam aktivitas *meupukat* yang telah sekian lama dilakoni oleh kebanyakan nelayan di Aceh, terutama pukot yang dikategorikan pukot tradisional di pesisir Aceh.

Pukot di Aceh

Pada dasarnya pukot tradisional di Aceh adalah sejenis pukot pantai (*beach seine*) yaitu suatu alat penangkap ikan berbentuk jaring panjang, bersayap, dan memiliki sebuah kantong pada bagian ujungnya.⁴ Alat ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan di lokasi pantai yang landai dan berpasir, serta lokasi-lokasi tertentu yang ditetapkan oleh *Panglima Laot*. Untuk satu pukot dioperasikan sekurang-kurangnya 15 orang dengan cara dilingkarkan pada titik tertentu, kemudian ditarik menelusuri dasar perairan menuju pantai dengan menggunakan perahu dayung.

Sebagai alat tangkap ikan tradisional, pukot di Aceh memiliki komponen yang saling mendukung dan

tidak dapat dipisahkan. Secara umum, komponen tersebut terdiri atas *jok pukot*, *ulaya*, *euntong*, dan *lamat*. Masing-masing komponen memiliki bentuk dan fungsi berbeda, antara lain:⁵

1. *Jok pukot* atau sayap; yaitu sepasang jaring yang terletak di sisi kiri dan kanan pukot yang berfungsi sebagai dinding untuk menggiring ikan agar masuk ke dalam kantong pukot. Komponen ini terbuat dari tali ijuk atau serat pohon enau.
2. *Ulaya* atau badan pukot; yaitu bagian badan jaring yang berbentuk bulat panjang dan terletak di tengah, yakni antara *jok pukot* dan *euntong*. Komponen ini terbuat dari benang katun dan berfungsi untuk mengurung ikan yang sudah masuk ke dalam kantong.
3. *Euntong* atau kantong; yaitu sebuah kantong berbentuk kerucut sebagai tempat ikan terperangkap. Komponen ini terbuat dari benang yang dirajut seukuran jari telunjuk dan dapat disesuaikan dengan ukuran jenis tangkapan yang ditargetkan.
4. *Lamat* dan *rundok*; yaitu tali penarik yang berfungsi untuk menarik pukot ke pantai. Komponen ini terletak pada bagian sayap. *Lamat* terletak pada sisi kiri dan disebut sayap I, sedangkan *rundok* terletak di sisi kanan dan disebut sayap II. Biasanya dibutuhkan sekitar 15 orang atau lebih personil penarik atau disebut juga *teumepoh*. Komponen ini terbuat dari batang rotan yang dipilin kira-kira sebesar pergelangan tangan orang dewasa.

Selain itu, untuk mengoptimalkan hasil tangkapan diperlukan pula komponen

³ Miftachuddin, 2015. *Kearifan Lokal dalam Komunitas Nelayan di Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, hlm.1.

⁴ Ardidja, Supardi, 2007. *Alat Penangkap Ikan*, Jakarta: Sekolah Tinggi Perikanan. hlm. 33.

⁵ Sulaiman, Nasruddin, dkk., 1992/1993. *Peralatan Menangkap Ikan Tradisional di Kabupaten Aceh Besar*. Daerah Istimewa Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh.

tambahan berupa pemberat dan pelampung untuk memastikan posisi pukat di dalam air. Yang tidak kalah pentingnya adalah perahu untuk mengantarkan pawang ke laut dan menentukan posisi di mana ada gerobolan ikan yang dapat ditangkap di waktu yang tepat untuk menurunkan pukat ke air.

Berdasarkan penjelasan di atas, pukat merupakan alat yang sederhana dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Bahan-bahan membuatnya alami, bahkan ukuran lubang jaring tidak terlalu rapat sehingga tidak membahayakan benih-benih ikan. Hal ini dikuatkan pula dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh *FAO (Food and Agriculture Organization)*, salah satu organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang membidangi pangan dan pertanian dunia pada tahun 1995 yaitu terdapat 9 (sembilan) kriteria suatu alat tangkap dikatakan ramah terhadap lingkungan, antara lain:⁶ (1) mempunyai selektifitas yang tinggi; (2) tidak merusak habitat; (3) menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi; (4) tidak membahayakan nelayan; (5) produksi tidak membahayakan konsumen; (6) *by-catch* rendah; (7) dampak ke *biodiversity* rendah; (8) tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi; dan (9) dapat diterima secara sosial.

Jenis pukat tarik atau pukat pantai sebagaimana pukat yang dikenal di Aceh tergolong dalam kategori ramah lingkungan. Dalam hal selektifitas, penggunaan pukat dapat disesuaikan dengan target, lebar jaring dapat dikondisikan dengan ukuran jenis tangkapan, minimal selebar jaji telunjuk orang dewasa. Pukat tidak merusak habitat di laut karena pukat selalu diturunkan pada titik tertentu di mana pawang dapat melihat gerombolan ikan sejenis. Alat yang sederhana juga tidak merusak tempat

berkembang biaknya ikan dan organisme lainnya. Dari segi nelayan sendiri, pukat juga cukup aman. Personil tidak perlu berlama-lama di tengah laut. Pawang bersama dua personil lainnya hanya perlu menempatkan pukat ke laut, lalu kembali. Setelah beberapa saat, pukat ditarik bersama-sama dari bibir pantai. Hasil tangkapan juga diperoleh dalam kondisi baik dan segar karena pukat dikejakan dalam satu hari.

Dari aspek sosial, pukat tidak membutuhkan investasi yang besar, hasil tangkapan juga diharapkan menguntungkan dan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat nelayan, tidak bertentangan dengan budaya setempat, dan tidak melanggar *hukum adat laot* yang mengatur hukum terkait aktivitas kelautan di Aceh.

Menurut Peraturan Daerah yang tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pasal 1, telah diatur beberapa hal, di antaranya:

1. Pemanfaatan secara optimal sumber daya dan jasa lingkungan kelautan, dan perikanan dan menjamin pengembangan ekologiannya secara berkelanjutan;
2. Melakukan konservasi sumber daya dan jasa lingkungan kelautan dan perikanan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan;
3. Menggunakan "pendekatan hati-hati" (*precautionary approuches*) dalam manajemen dan pengembangan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan, dan perikanan;

⁶ Tadjuddah, Muslim, dkk., 2009. *Kajian Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Menurut Klasifikasi Statistik Internasional Standar FAO*, <http://tadjuddinmuslim.wordpress.com>.

4. Perlu menjaga ekosistem secara keseluruhan, termasuk jenis ikan yang tidak ditargetkan untuk dieksploitasi;
5. Perlu melestarikan keanekaragaman kehidupan laut;
6. Perlu mempergunakan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan dan perikanan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja dan keseimbangan ekologi yang mantap yang sesuai dengan objektif pembangunan daerah;
7. Menempatkan lembaga adat laut dan masyarakat secara luas dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
8. Memberikan prioritas bagi pelaku lokal dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Mempedomani Qanun ini berarti para nelayan terikat dengan aturan yang secara lebih dekat dipantau oleh Lembaga Adat *Laot*. Aturan membatasi jumlah ikan yang dapat diambil karena laut Aceh tidak untuk dieksploitasi. Nelayan sudah mengetahui hal itu, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada nelayan nakal dan curang setiap saat.

Lebih rinci, keberadaan pukot di Aceh tidak mengancam ekosistem laut. Secara umum masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan di laut dan teknik ini diatur dalam Hukôm Adat Laôt, seperti seperti *Palong*, *Pukat langgar*, *Pukat Aceh*, *Perahoe*, *Jalo*, *Jeue*, *Jareng*, *Ruleue*, *Kawe go*, *Kawe tiek*, *Geunengom*, *Bubee*, *Sawok/Sareng*, *Jang*, *Jeureumai*, dan *Nyap*. Semuanya termasuk kategori ramah lingkungan.

Menurut ketentuan *hukom adat laot*: (a) Pelaksanaan larang melaut di hari jumat tidak saja sebagai hari libur bagi kaum nelayan dan kesempatan memperbaiki boat. Tapi juga memberikan kesempatan kepada populasi ikan untuk bertelur; (b) Semua bekas perbaikan itu tidak boleh dibuang sembarangan. *hukom adat laot* sudah mengatur sampai kepada tidak boleh membuang ikan yang lebih; dan (c) *hukom adat laot* melarang penggunaan alat-alat yang tak ramah lingkungan.⁷ Hukum dan ketentuan seperti ini diatur secara lengkap dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh perangkat hukum terutama *panglima laot*.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya terdapat perbedaan pandangan tentang pukot antara pemahaman lokal dan pemahaman di tingkat nasional, sehingga pukot dilarang digunakan di era reformasi ini. Pukot tarik dianggap merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Padahal di Aceh, aktivitas melaut telah diatur secara detil mulai dari alat, pengelolaan sumber daya laut, penyelesaian konflik dan sengketa, hingga hukuman bagi pelaku pelanggaran ketentuan adat.

Nilai-Nilai yang Melekat pada Pukat

Bila penggunaan pukot dilarang, maka bukan hanya pukot sebagai alat tangkap saja yang akan hilang dari masyarakat, akan tetapi nilai-nilai yang melekat pada aktivitas *meupukat* juga terancam hilang. Nilai tersebut merupakan karakter masyarakat nelayan Aceh, seperti:

1. Nilai kebersamaan dan gotong royong, tercermin dari aktivitas *meupukat* yang harus dikerjakan secara bersama-sama mulai dari persiapan sampai penyelesaian;

⁷ Sulaimantripa, 2008. *Panglima Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Aceh*. Opini: Kabar Indonesia, <http://www.kabarindonesia.com>

2. Nilai keadilan, dapat dilihat dari sistem bagi hasil. Hasil tangkapan tidak semuanya dijual, melainkan dibagi secara adil kepada, *pawang laot*, awak perahu, awak *teumarek*, dan sisanya dijual. Hasil penjualan juga dibagi setelah dikurangi modal yang dibutuhkan untuk penangkapan berikutnya.
3. Nilai optimisme dan semangat yang tinggi, juga dapat dirasakan pada tahap penarikan pukat. Para awak *teumarek* sudah siaga dibibir pantai. Melihat *pawang* memberi isyarat dari kejauhan, mereka mulai menarik pukat bersama-sama dengan diiringi teriakan kecil lantunan syair-syair yang indah dalam bahasa Aceh, sesekali terdengar pula gurauan. Mereka melakukannya dengan semangat tak peduli berapa banyak hasil tangkapan yang nantinya mereka terima.
4. Nilai kesabaran, terlihat dari ketelatenan mereka merawat peralatan yang harus mereka periksa secara berkala, menjahit kembali jaring yang rusak dengan tangan mereka, dan itu dilakukan dengan konsistensi yang baik. Mereka sabar menunggu hari baik disesuaikan dengan kondisi alam yang baik untuk melabuhkan pukat.
5. Nilai kesetiaan, mempertahankan tim dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Namun biasanya kelompok masyarakat nelayan selalu saling setia. Dengan setia pada kelompoknya, mereka akan dengan mudah memahami cara kerja tim dan akan mudah pula melaksanakannya,
6. Terampil, nilai ini tidak hanya dimaksudkan kepada para personil pukat, tetapi juga orang-orang di sekitarnya.

Khususnya kaum perempuan, yang juga turut andil dalam menyempurnakan kegiatan pukat. Jika ikan hasil tangkapan tidak habis terjual, maka mereka akan memprosesnya menjadi ikan asin, lalu dipasarkan.

Nilai-nilai sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagian nilai yang dapat dengan mudah diamati dalam kehidupan masyarakat nelayan khususnya yang menggunakan pukat. Haruskah pukat musnah dari budaya Aceh?

Penutup

Peraturan dibuat untuk kehidupan yang lebih baik. Peraturan dibuat karena kondisi buruk yang harus dibenarkan. Akan tetapi, peraturan sepatutnya dibuat dengan pertimbangan nilai-nilai dari budaya lokal. Pukat tradisional di Aceh adalah salah satu hasil kreasi masyarakat nelayan di Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan karena merupakan alat tangkap ikan yang hemat energi dan ramah lingkungan.

Penciptaannya tidak terlepas dari persepsi masyarakat tentang cara memelihara lingkungan alam sehingga dapat dijadikan tempat mencari nafkah secara berkesinambungan. Keberadaannya masih sangat penting bagi nelayan Aceh karena dapat membantu memperoleh hasil tangkapan yang cukup baik. Selanjutnya, pemerintah hanya perlu mengawal agar semua dapat berjalan lancar, semua aparaturnya bertugas sebagaimana mestinya. Artinya, seharusnya bukan alat yang dilarang, tetapi aturan tegas tentang tata cara pengelolaan yang perlu ditingkatkan.

Essi Hermaliza, S.Pd.I. adalah Fungsional Umum Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

Potensi Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Terhadap Kesejahteraan Komunitas Nelayan

Oleh: Dharma Kelana Putra

Pendahuluan

Sudah lebih dari lima dasawarsa berlalu sejak sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian dari program pembangunan di Indonesia, tepatnya sejak awal pemerintahan orde baru hingga saat ini. Berbagai Menteri silih berganti, berbagai kebijakan telah dilakukan. Tetapi produktivitas yang dihasilkan dianggap masih belum sepenuhnya optimal. Padahal panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut sebesar 5,4 juta km persegi, atau 2/3 dari luas wilayah Indonesia yakni 7,1 juta km persegi¹.

Seperti yang dikutip dalam sebuah media elektronik, produksi perikanan Indonesia di tahun 2015 memiliki potensi yang cukup besar yakni sekitar 13,58 juta ton² atau senilai Rp. 564 Trilyun³. Jika dibagi secara merata dengan jumlah provinsi yang ada, maka rata-rata potensi perikanan di masing-masing provinsi tahun ini adalah 400.000 ton atau senilai Rp.16,6 Trilyun.

Di Aceh persoalan kelautan dan perikanan sudah sejak lama menjadi fokus dalam program pembangunan daerah. Sektor ini kian populer setelah Aceh dilanda

gempa dan tsunami 2004. Terbukti, sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu sektor produktif menjadi fokus ketiga dalam program rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan dan pengembangan wilayah Aceh⁴. Bahkan, Pemerintah Aceh telah membuat Qanun yang membahas tentang pengelolaan sektor perikanan secara spesifik⁵. Qanun ini sangat sesuai dijadikan sebagai *guidelines* atau panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan sektor perikanan Aceh saat ini, sebab di dalamnya membahas masalah perikanan dengan sangat detail.

Salah satu bentuk realisasi dari rencana program pengembangan sektor perikanan di Aceh adalah pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Lampulo di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Secara astronomis, Pelabuhan Perikanan Lampulo berada pada 5,56°62'11⁰ LU dan 95,33°55'21⁰ BT. Pelabuhan Perikanan ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 50 hektar, dengan menggunakan dana dari APBA, APBN, BRR, serta bantuan dana dari program *debt swap*⁶ yang diberikan oleh Pemerintah Italia⁷. Program ini merupakan penghapusan sebagian hutang pemerintah Indonesia dengan konsekuensi

¹Sumber:

<http://kmip.faperta.ugm.ac.id/potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia/>

²Sumber:

<http://www.siperubahan.com/read/1913/2015-Potensi-Produksi-Perikanan--Bisa-Capai-1382-Juta-Ton>

³Sumber:

<http://finance.detik.com/read/2015/01/22/143618/2810894/4/menteri-susi-sebut-sektor-perikanan-dan-kelautan-bernilai-nyaris-rp-12-ribu-triliun>

⁴Lihat selengkapnya pada link berikut:

<http://www.bappenas.go.id/files/2113/5228/3473/bab-33-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-nanggroe-aceh-darussalam-nad-dan-sumatera-utara.pdf>

⁵ Lihat Qanun Aceh No. 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan

⁶ Lihat definisi *debt swap* dalam http://www.investorwords.com/7815/debt_swap.html

⁷Sumber:

<http://www.kabarinvestigasi.com/2011/02/untuk-membangun-fasilitas-pelabuhan.html>

jumlah tersebut menjadi investasi pemerintah Italia dalam kegiatan penggarapan sumber daya alam di salah satu daerah yang potensial dalam kurun waktu tertentu. Dengan dana yang tidak sedikit, tentunya fasilitas ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar bagi PAD dan menjadi sumber pemasukan yang signifikan bagi masyarakat Aceh.

Kompleks Pelabuhan Perikanan Lampulo terdiri dari beberapa bagian, yakni bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tempat parkir, pasar ikan, dermaga, kolam, areal bisnis yang akan diisi oleh para investor di kemudian hari. Di areal bisnis bahkan sudah terlihat beberapa titik pembangunan fasilitas pabrik dan gudang. Berdasarkan data dari UPTD PPP Lampulo tahun 2012, tercatat sedikitnya 15 badan usaha yang beraktivitas di areal pelabuhan, tiga diantaranya bahkan sudah berbentuk Perseroan Terbatas⁸. Ini pertanda bahwa lokasi ini akan menjadi Pelabuhan Perikanan berkelas internasional jika tidak ada masalah berarti dalam proses pengembangannya.⁹

Meski fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang dibangun di areal Pelabuhan Perikanan Lampulo tergolong masih baru, komunitas nelayan di Aceh sudah lama mengenal sistem lelang sebagai bagian dari aktivitas mereka. Ini dapat dibuktikan dari banyaknya jumlah Pelabuhan Perikanan Rakyat yang tersebar di hampir di seluruh wilayah *Lhok*. Hanya saja, sistem lelang ini sifatnya swakelola dan tidak dilaksanakan secara konsisten karena dianggap rumit dan berbelit-belit baik oleh pedagang perantara maupun nelayan.

Anggapan inilah yang menjadikan permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji. Di satu sisi, sistem lelang yang

dianggap rumit ini membuat para pedagang cenderung menawarkan langsung ikan kepada nelayan tanpa harus melalui jalur lelang. Sementara di sisi lain, nelayan lebih senang menjual tanpa melalui jalur lelang karena uang diperoleh hari itu juga. Jika proses lelang tidak dijalankan secara konsisten, maka pembangunan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan menjadi sia-sia secara substantif karena fungsinya tidak jauh berbeda dengan pasar ikan konvensional.

Idealnya, sistem lelang merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan untuk mempertahankan ketersediaan ikan di pasar dan menjaga agar fluktuasi harga ikan menjadi lebih stabil. Kemudian selain dapat meningkatkan penghasilan nelayan secara optimal, sistem lelang juga membuat rantai distribusi ikan dari nelayan ke pasar lebih pendek dan teratur. Meski begitu, ternyata sistem lelang juga sangat rentan terhadap rekayasa yang dilakukan elit-elit tertentu untuk kepentingan mereka, baik secara pribadi maupun kelompok. Alih-alih untuk menyejahterakan nelayan, institusi sosial yang telah dibangun justru menjadi medium eksploitasi nelayan yang sistemik, terstruktur, *massive*, dan tersamar.

Sejarah Lelang dan Mekanisme Pelelangan Ikan

Dalam sejarahnya, sistem lelang pertamakali diperkenalkan di Indonesia oleh orang-orang Belanda melalui VOC tahun 1750. Pelelangan pertama dilakukan terhadap hasil-hasil bumi, khususnya teh dan beragam jenis rempah-rempah¹⁰. Setelah sukses dengan lelang pertama, sistem lelang terus dibudayakan dalam setiap penjualan hasil-hasil bumi nusantara.

⁸Sumber: <http://dkp.acehprov.go.id/uptd-ppp-lampulo>

⁹Lihat <http://aceh.tribunnews.com/2014/02/06/pelabuhan-lampulo-masih-banyak-kendala>

¹⁰Sumber: <http://lydiafturnip.blogspot.com/2009/07/sejarah-lelang-di-indonesia.html>

Pasca pembubaran VOC, sistem lelang kemudian diatur oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Staatsblad 1908 No. 189 yang mengatur tentang sistem lelang. Pasca dikeluarkannya peraturan ini, penjualan secara lelang semakin berkembang, bahkan hingga saat ini. Lelang tidak hanya dilakukan untuk penjualan komoditas yang bernilai ekonomi, benda seni dan barang mewah, tetapi juga untuk pengadaan barang dan proyek pekerjaan umum di pemerintahan¹¹.

Salah satu alasan mengapa saat ini aktivitas lelang didorong penggunaannya secara luas adalah prinsip sama-sama diuntungkan, yakni meningkatkan pendapatan negara dari retribusi lelang di satu sisi dan meningkatkan harga jual suatu barang atau komoditas sampai ke harga yang tertinggi. Karena prinsip inilah, sistem lelang dijadikan sebagai salah satu model penanggulangan kemiskinan komunitas nelayan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penjualan ikan hasil tangkapan mereka.

Kegiatan pelelangan ikan secara formal dilakukan dalam fasilitas milik pemerintah yang dinamakan Pelabuhan Perikanan, seperti Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dan Pelabuhan Perikanan samudera (PPS). Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2007¹².

Di luar dari itu, pelelangan ikan juga dilakukan secara non formal di fasilitas-fasilitas pelelangan ikan yang dibangun oleh kelompok masyarakat secara mandiri seperti bagan atau tangkahan. Ada

dua bentuk mekanisme pelelangan yang biasa digunakan, bentuk pertama yakni lelang konvensional dimana juru lelang menentukan harga dasar lalu setiap peserta lelang diberi kesempatan untuk menyampaikan penawaran mereka secara terbuka hingga tidak ada peserta lain yang menawar lebih tinggi. Bentuk lelang seperti ini digunakan pada pelelangan ikan di Pasar Tsukiji Tokyo Jepang¹³.

Pasar Tsukiji adalah salah satu Tempat Pelelangan Ikan terbesar di dunia yang berada di Kota Tokyo Jepang. Tempat Pelelangan yang hanya beroperasi pagi hari ini diresmikan tanggal 2 Februari 1935. Pasar Tsukiji menjadi salah satu referensi model pengembangan tempat pelelangan ikan terpadu yang ada di Indonesia terutama dalam hal penataan ruang dan manajemen operasional¹⁴, karena Pasar Tsukiji menerapkan kedisiplinan waktu yang sangat ketat.

Salah satu situs internet¹⁵ menjelaskan bahwa pukul 03.00 dini hari, orang-orang sudah mulai beraktivitas di pasar ini. Kapal-kapal yang membawa ikan dari berbagai belahan dunia terlihat berbaris sambil menurunkan muatan mereka. Panitia lelang terlihat sibuk mencatat, menimbang, dan menaksir harga pembuka berdasarkan kuantitas, kualitas, dan ketersediaan ikan. Lelang ikan dimulai sekitar pukul 05.20 pagi.

Aktivitas ini tertutup untuk umum. Hanya panitia, peserta atau perwakilan peserta lelang yang diperbolehkan turut serta. Para peserta biasanya adalah pedagang besar yang membuka toko di areal pasar ikan Tsukiji, perwakilan dari perusahaan pemrosesan makanan, serta

¹¹Sumber:

<http://www.balailelang.co.id/index.php/sejarah-lelang/sejarah-lelang-di-indonesia>

¹² Lihat selengkapnya pada link berikut:

<http://dfw.or.id/wp-content/uploads/2011/10/referensi/PERMEN-2007-6.pdf>

¹³ Lihat selengkapnya pada link berikut:

http://www.tsukiji-market.or.jp/tukiji_e.htm

¹⁴ Lihat selengkapnya pada link berikut:

<http://atanitokyo.blogspot.com/2008/01/studi-banding-produk-perikanan-dari.html>

¹⁵ Lihat selengkapnya pada link berikut:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tsukiji_fish_market

hotel, restoran, dan kafe (*Horeca*). Aktivitas lelang berakhir pukul 07.00 pagi. Ikan yang sudah terjual kemudian dibawa oleh masing-masing pembeli. Proses pembersihan dimulai Setelah seluruh peserta meninggalkan tempat pelelangan. Proses pembersihan seluruh areal pelelangan ikan selesai pada pukul 13.00 siang hari. Setelah itu, areal tersebut terlihat sepi sampai dini hari berikutnya.

Bentuk kedua adalah mekanisme lelang dimana setiap peserta lelang menuliskan harga penawaran mereka dalam secarik kertas. Kertas tersebut dimasukkan dalam sebuah kotak kaca. Setelah seluruh penawaran terkumpul, juru lelang menuliskan harga penawaran mereka di papan tulis. Penawaran tertinggi diputuskan sebagai pemenang lelang. Bentuk ini dapat dijumpai pada penjualan karet sistem lelang yang ada di komunitas petani karet Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman¹⁶. Mekanisme ini dianggap lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih adil.

Dalam proses pelelangan ikan yang baik, struktur organisasi penyelenggara atau pelaksana lelang sedikitnya harus memiliki¹⁷:

1. Pemimpin lelang, tugasnya adalah memimpin dan mengoordinasikan aktivitas pelelangan ikan.
2. Juru Lelang, bertugas menjalankan pelelangan secara terbuka, mengumumkan pemenang lelang, mencatat dan melaporkan data pemilik ikan, peserta lelang, pemenang lelang, jumlah dan jenis ikan yang dilelang serta besarnya nilai lelang.

3. Juru tulis atau tenaga administrasi lelang, tugasnya menjalankan kegiatan tata usaha pelelangan seperti; surat menyurat, catatan dan laporan jumlah kapal domisili, jumlah kapal yang berlabuh, produksi ikan, nilai produksi dan bea lelang.
4. Juru timbang, tugasnya melakukan penimbangan ikan yang masuk ke areal TPI dan menerakan label yang berisi nama pemilik ikan, jenis dan berat ikan yang telah ditimbang.
5. Juru bayar atau bendahara, tugasnya mengelola keuangan, menagih atau menerima pembayaran secara tunai dari pemenang lelang, serta menyerahkan hasil pungutan bea lelang kepada pemerintah melalui UPTD terkait.

Kegagalan Sistem Lelang: Ketidaksiapan Struktural atau Maladaptasi Komunitas Nelayan?

Sistem pelelangan ikan pada dasarnya merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan pemerintah untuk memutus lingkaran kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan komunitas nelayan secara kolektif. Sistem ini sangat baik diterapkan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Melalui pelelangan ikan, komunitas nelayan yang beraktivitas di Pelabuhan dapat didorong lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan perekonomian.

Partisipasi dan keterlibatan menjadi sarana perekat atau kohesi sosial yang berdampak pada penguatan posisi tawar komunitas nelayan untuk menangkai hubungan-hubungan sosial yang sifatnya

¹⁶ Lihat penelitian Badaruddin, dkk. 2006. *Modal Sosial dan Pengembangan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Tiga Komunitas Petani Karet di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)*. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti: Tidak diterbitkan.

¹⁷ Lihat penelitian Sinaga (2012). Betharia Helena Rotua. 2012. *Peranan Pelelangan Ikan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan Dan Kaitannya Dengan Pengembangan Wilayah (Studi Perbandingan Aktivitas TPI Percut Dan TPI Pekalongan)*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara. Hlm. 8

eksploitatif. Tentunya, hal itu dapat dicapai jika semuanya dilakukan sesuai kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

Pada pelaksanaannya, lelang ikan di TPI seringkali terkendala oleh masalah-masalah kecil yang berdampak besar. Mengapa hal itu sampai terjadi? Beberapa opini mengemukakan bahwa kegagalan pelaksanaan lelang ikan secara konsisten disebabkan karena komunitas nelayan belum mampu beradaptasi dengan nilai baru. Mereka menganggap sistem lelang ini sangat merepotkan dan uang hasil penjualan ikan tidak bisa langsung dinikmati hari ini. Benarkah demikian? Jawabannya memang benar, tetapi tidak sepenuhnya seperti itu.

Selalu ada faktor lain yang menyebabkan rekayasa sosial konstruktif berubah menjadi rekayasa sosial yang eksploitatif. Sementara, menempatkan komunitas yang termarginalkan pada posisi “yang selalu salah” adalah cara efektif yang kerap digunakan oleh segelintir oknum untuk melindungi zona nyaman mereka. Gejala ini memang belum terlihat di Pelabuhan Perikanan Lampulo, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan muncul di kemudian hari.

Kasus yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu Jawa Barat, mekanisme pelelangan ikan dinilai sarat akan kepentingan¹⁸. Dalam hal pemilihan kepengurusan lelang, penunjukan KUD Mina sebagai pengurus lelang terkesan diskriminatif dan tidak transparan padahal masih ada KUD lain yang dianggap lebih kompeten. Selain itu, muncul opini bahwa pemanfaatan retribusi yang dikutip secara resmi dinilai tidak jelas atau tidak tepat sasaran.

Ada beberapa poin negatif yang mengemuka terkait kepengurusan KUD Mina dalam proses lelang di PPN

Pelabuhanratu, yakni; kondisi manajemen KUD yang belum baik, tingkat pendidikan pengurus yang masih rendah, kurangnya pengetahuan dan pengalaman para pengurus, sikap dan perilaku pengurus yang kurang disenangi anggota, modal KUD yang belum memadai untuk menjalankan proses lelang. Akibatnya, pelelangan ikan tidak dapat dijalankan secara optimal dan nilai jual ikan yang seharusnya besar malah terjun bebas. Jadi, wajar jika nelayan tidak mau mengikuti proses pelelangan dengan berbagai alasan.

Kasus serupa juga terjadi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di Probolinggo¹⁹. Pelelangan ikan masih belum dapat dijalankan secara konsisten karena beberapa masalah yang belum dapat teratasi, diantaranya:

1. Tidak adanya kategorisasi untuk partisipan lelang. Baik pedagang besar maupun pedagang kecil, semuanya dianggap sebagai penawar. Hal ini mengakibatkan pedagang besar cenderung mendominasi lelang karena secara finansial mereka memiliki modal yang lebih besar untuk menawarkan harga ikan lebih tinggi dari penawar lainnya.
2. Pembayaran atas ikan yang terjual sering terlambat, atau dibayar keesokan harinya. Ini menguntungkan penawar, sebab mereka dapat memperoleh keuntungan tanpa harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Tetapi ini merugikan nelayan atau pemilik ikan yang membutuhkan uang hasil penjualan ikan untuk membiayai kebutuhan hidup mereka pada hari itu.

Berdasarkan perbandingan terhadap dua contoh kasus permasalahan seputar operasionalisasi Tempat Pelelangan Ikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan

¹⁸Sumber:
<http://toekyk.blogspot.com/2011/10/deskripsi-dan-mekanisme-pelelangan-ikan.html>

¹⁹ Lihat selengkapnya pada link berikut:
<http://aquaculture-info.blogspot.com/2012/04/lelang-ikan-di-buka-pedagang-besar.html>

bahwa pelaksanaan lelang ikan tidak berjalan bukan hanya karena kegagalan adaptasi nelayan terhadap sistem lelang dan inkonsistensi aparat pemerintah mengawal proses lelang, melainkan karena tidak adanya pondasi yang kuat dalam pengelolaan lelang ikan yakni kualitas sumber daya manusia yang bersih, jujur, dan bertanggungjawab. Mengingat bahwa permasalahan ini sifatnya universal, maka kegagalan bisa saja terjadi pada sistem lelang TPI Lampulo. Akan berbeda ceritanya jika sistem tersebut dibangun dengan modal sosial sebagai pondasi yang kuat sejak dini. Lebih lanjut untuk membangun pondasi modal sosial yang baik, Lubis (2002)²⁰ mengatakan bahwa elemen inti modal sosial yang ideal sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Sikap Saling Percaya (*trust*), yang meliputi; kejujuran (*honesty*), kewajaran (*fairness*), sikap egaliter (*egalitarianism*), toleransi, dan kemurahan hati (*generosity*).
2. Jaringan Sosial, yang meliputi; partisipasi, pertukaran timbal-balik (*resiprositas*), solidaritas, kerjasama, dan keadilan (*equity*).
3. Institusi (*pranata*), yang meliputi; nilai-nilai yang dianut bersama (*shared value*), norma dan sanksi, serta aturan-aturan.

SDM yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab akan menciptakan sikap saling percaya (*trust*) sebagai pembentuk modal sosial yang kuat diantara komunitas nelayan. Sebaliknya, SDM yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab akan menyebabkan modal sosial melemah atau bahkan hilang sama sekali. Ini sangat buruk dalam konteks pengembangan masyarakat.

Hal senada diutarakan oleh Badaruddin (2003: 6) bahwa lemahnya modal sosial menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada komunitas nelayan yang diawali dengan terperangkapnya mereka dalam interaksi *patron-klien* yang eksploitatif.

Lebih lanjut, keberhasilan penerapan model pengembangan masyarakat melalui penguatan modal sosial telah dibuktikan oleh Badaruddin, dkk (2006) dalam bentuk penjualan karet sistem lelang pada tiga komunitas petani karet di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Hasil dari penerapan model pengembangan masyarakat tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan komunitas petani saja, tetapi juga bagi kesejahteraan keluarga mereka. Ini dikarenakan kerjasama kolektif dalam penjualan karet sistem lelang dapat menaikkan posisi tawar petani karet terhadap harga pasar dibandingkan menjual secara individu.

Satu hal yang menarik bahwa ide kerjasama kolektif pada komunitas petani karet di Sumatera Barat untuk menjalin kerjasama yang dilanjutkan dengan diskusi non-formal di *lopo* (warung kopi), dan kemudian berlanjut lagi dengan diskusi formal yang difasilitasi oleh *Kepala Jorong*. Kunci dari terbentuknya kerjasama kolektif tersebut adalah kepercayaan terhadap para pengagasnya.

Mekanisme tertularnya kerjasama kolektif itu sendiri dapat dikatakan unik, sebab kerjasama kolektif tersebut ditularkan melalui lembaga-lembaga non-formal, seperti *lopo* dan sebagainya. Hal ini dikarenakan *lopo* pada komunitas petani karet di Pasaman tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk bersantai sambil

²⁰ Lihat penelitian Lubis, Zulkifli, dkk. 2002. *Resistensi, Persistensi, dan Model Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Milik Bersama: Kajian Antropologis Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan di Sumatera Utara. Proyek RUKK-I. Menristek: Laporan Penelitian.*

meminum kopi, tetapi juga sebagai salah satu sarana pertukaran informasi.

Pemanfaatan Modal Sosial: Pisau Bermata Dua

Modal sosial pada pembahasan ini didefinisikan sebagai hubungan sosial antarindividu maupun antarkelompok yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lain, seperti kesalingpercayaan guna melakukan kerjasama demi mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Dalam kaitannya terhadap variabel ekonomi, tujuan atau konsep kepentingan bersama mengarah pada kesejahteraan baik secara individual maupun kolektif.

Meski belum ada penelitian yang mengkaji secara teoritis, modal sosial ternyata dapat digunakan untuk melakukan rekayasa sosial dengan menciptakan atau mempertahankan kemiskinan pada suatu komunitas. Logikanya, modal sosial adalah sebuah sarana untuk pencapaian tujuan. Jika dimanfaatkan untuk hal-hal positif maka ia akan memberikan manfaat, demikian pula sebaliknya.

Pemanfaatan modal sosial dapat meningkatkan penghasilan suatu kelompok di satu sisi, tetapi mengakibatkan berkurangnya penghasilan bagi pihak lainnya. Misalkan ikan yang terjual secara lelang dengan harga yang tinggi akan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada nelayan, tetapi di sisi lain akan mengurangi penghasilan pemenang lelang karena selisih harga (*margin*) antara harga beli lelang dengan harga jual ikan di pasar semakin sedikit.

Dalam dunia perniagaan, berkurangnya keuntungan juga dianggap sebagai kerugian. Apalagi jika keuntungan tersebut berkurang dalam jumlah besar. Jika kondisi ini terjadi selama satu atau dua kali, mungkin para pedagang pemenang lelang masih mampu menanggung kerugian.

Tetapi jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, maka para pedagang ikan tersebut akan mengalami kerugian yang berkepanjangan. Kondisi inilah yang berpotensi menyebabkan munculnya rekayasa sosial, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja.

Di Sumatera Utara, hasil penelitian yang pernah dilakukan tahun 2009, mengindikasikan adanya rekayasa sosial yang diciptakan oleh para *tauke* dengan cara menghilangkan kebebasan nelayan kecil melalui pemberian pinjaman-pinjaman tanpa bunga dalam jumlah yang relatif besar untuk membiayai operasional kerja dan kebutuhan hidup keluarga nelayan tersebut. Dari pinjaman ini, nelayan secara tidak langsung terjebak dalam suatu bentuk hutang budi berkepanjangan kepada *tauke* yang meminjamkan uang. Kondisi ini disadari oleh komunitas nelayan, tetapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena mereka sendiri mengalami kesulitan dalam mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan resmi, seperti bank, BPR, dan lembaga keuangan lainnya.

Nelayan yang telah terikat dengan seorang *tauke* harus menjual ikan hasil tangkapan mereka kepada *tauke* tersebut. Mereka tidak diperkenankan untuk menjual ikannya kepada *tauke* lain ataupun menjualnya dengan cara lelang. Kerugiannya adalah bahwa harga ikan yang dijual mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh *tauke* tersebut, dan tak jarang harga yang ditetapkan berada di bawah harga pasar (harga ijon). Uang hasil penjualan ikan yang diserahkan kepada nelayan langsung mengalami pemotongan sejumlah cicilan yang telah disepakati sebelumnya. Tentu ini sangat merugikan bagi nelayan secara sepihak.

Nelayan yang terikat dengan satu *tauke*, tidak diperbolehkan untuk menjual ikannya kepada *tauke* lain meski harga yang ditetapkan lebih tinggi. Jika *tauke* mengetahuinya, maka nelayan tersebut akan

dikenai sanksi-sanksi tertentu, seperti; diminta untuk melunasi hutangnya saat itu juga, menyita perahu milik nelayan, dan sanksi lain sesuai kehendak *tauke*.

Bagaimanapun, *tauke* akan selalu mengetahui tindakan apapun yang dilakukan oleh nelayan. Ini terjadi karena ada ikatan kuat antara satu *tauke* dengan *tauke* yang lain. Dalam konteks sosiologi, ikatan ini disebut sebagai jaringan sosial. Jaringan sosial ini membentuk dimensi modal sosial yang mengikat (*bonding*) anggota di dalam kelompok, menjembatani (*bridging*) hubungan antarkelompok, serta mengaitkan (*linking*) kelompok dengan sumber daya penting yang berada di luar mereka.

Alih-alih menampilkan persaingan dalam bidang usaha, antara satu *tauke* dengan *tauke* lainnya memiliki hubungan kedekatan yang tidak terlihat oleh publik. Ini menciptakan karakteristik unik dari modal sosial para *tauke*, yang tidak hanya kuat tetapi juga tidak disadari oleh komunitas nelayan atau kelompok lain. Meski komunitas nelayan juga memiliki modal sosial yang sama kuatnya, keterikatan komunitas nelayan terhadap *tauke* masih belum dapat diputus, sehingga mustahil bagi nelayan untuk lepas dari keterikatan ini tanpa ada intervensi dari lembaga yang kuat, seperti; pemerintah, DPRD, kelembagaan adat, dan lain sebagainya.

Praktik ijon harus diperhatikan secara serius, sebab tindakan tersebut melanggar Qanun Aceh No. 7 Tahun 2010 tentang Perikanan Pasal 25 ayat 3, yang berbunyi “*pemasaran ikan hasil tangkapan wajib dilakukan melalui pelelangan secara terbuka di pusat pemasaran ikan*”, yang apabila dilanggar pelakunya dapat dikenai sanksi berupa kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000,-. Sekali saja pemerintah lengah, praktik ini bisa saja dialami komunitas nelayan yang beraktivitas di Pelabuhan Perikanan

Lampulo perlahan tetapi pasti. Mengingat bahwa struktur sosial yang ada di sepanjang pesisir barat pulau Sumatera memiliki karakteristik yang hampir sama, khususnya pada komunitas nelayan dan masyarakat pesisir.

Alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan cara memperkuat fungsi dan peranan lembaga adat yang mengurus wilayah laut. Lembaga adat ini sudah dikenal oleh masyarakat Aceh sejak dulu sebagai *Panglima Laot*. Kelembagaan *Panglima Laot* saat ini merupakan bagian dari kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yang melibatkan tokoh masyarakat, nelayan dan pemuda di tingkat *Lhok*, Kota, atau Provinsi. Kelembagaan Adat *Panglima Laot* tidak hanya bertugas untuk meningkatkan kesadaran komunitas nelayan dalam menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan, tetapi juga berhak atas pengelolaan *lhok* sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah sejauh satu *leuen pukot* atau 200 meter dari garis pantai.

Dasar pembentukan pokmaswas adalah Undang - undang (UU) No. 45 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 tentang perikanan. Salah satu pasalnya (pasal 67) menyebutkan, masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Keberadaan Pawang laot di seluruh Provinsi Aceh dikuatkan oleh Pasal 27 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Qanun No. 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.

Tetapi itu saja tidak cukup, mengingat bahwa tugas dan tanggung jawab *Pawang Laot* akan semakin berat apabila Pelabuhan Perikanan Lampulo mengalami transformasi menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera. Peraturan-peraturan yang ada harus diperlengkap lagi dengan suatu kebijakan yang dapat menguatkan fungsi kelembagaan *pawang laot* serta lembaga

adat lain dalam mengantisipasi dampak-dampak sosial-ekonomi yang muncul seiring dengan perkembangan wilayah di sekitar PPP Lampulo. Adapun dampak sosial-ekonomi yang mungkin terjadi diantaranya:

1. Pembengkakan hutang Pemerintah Daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia karena program *debt swap*.
2. Terjadinya migrasi masuk (*in migration*²¹) dalam skala besar, yang akan berdampak terjadinya akulturasi atau bahkan asimilasi budaya dalam tatanan sosial masyarakat.
3. Kerusakan lingkungan *massive* akibat pengelolaan sumber daya laut yang sifatnya destruktif.
4. Masalah sampah, limbah ikan, dan limbah hasil pemrosesan dari industri perikanan.
5. Berkurangnya produktivitas hasil laut akibat kondisi tangkap lebih (*overfishing*).
6. Gangguan keamanan yang muncul di lingkungan PPP Lampulo, baik di darat (mis; perampok atau preman), dan di laut (bajak laut atau perompak).
7. Kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dan kelompok pendatang.
8. Degradasi moral dan penyakit masyarakat.
9. Kesenjangan ekonomi yang tinggi antara nelayan yang memiliki alat tangkap berukuran besar dengan nelayan yang memiliki alat tangkap berukuran sedang atau kecil.
10. Kesenjangan ekonomi antara tauke bangku dan nelayan.

Kemudian, kebijakan tersebut juga harus mengatur hubungan informal antara nelayan dan tauke, baik dalam hal ikatan kerja, hutang-piutang, serta konsekuensi dari pemberian hutang tersebut secara spesifik. Ini harus dilakukan sebab profesi nelayan sangat rentan terhadap hubungan patron-klien yang sifatnya eksploitatif. Dengan adanya hal ini, nelayan berada pada posisi yang aman tanpa harus mengorbankan pihak lain. Tetapi tentunya, seorang *Panglima Laot* juga harus bebas dari bentuk-bentuk keterikatan dalam bentuk apapun dengan *tauke*, rentenir, pengusaha, atau pihak lain yang memiliki kepentingan atas hasil laut Aceh. Jika tidak, nasib nelayan Aceh akan sama saja seperti daerah-daerah lain di Indonesia.

Penutup

Sistem Pelelangan Ikan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Lampulo memiliki dua potensi pokok yang mempengaruhi kesejahteraan komunitas nelayan yang beraktivitas di lokasi tersebut. Potensi pertama adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan, sementara di sisi lain berpotensi untuk memiskinkan komunitas nelayan. Itu semua sangat bergantung pada komitmen nelayan untuk menyejahterakan diri dan kelompoknya, fungsi pengawasan dari lembaga adat, serta pemerintah dalam mencerdaskan, menyadarkan, dan memberdayakan komunitas nelayan.

Penjualan ikan sistem lelang akan menghadapi banyak tantangan di masa yang akan datang. Kegagalan pelaksanaan lelang ikan secara konsisten tidak serta-merta terjadi karena kegagalan adaptasi nelayan terhadap hal-hal baru, tetapi karena tidak adanya sikap saling percaya (*trust*) terhadap kepada panitia pelaksana lelang ikan serta

²¹ Lihat definisi migrasi selengkapnya pada link berikut:
[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GE
OGRAFI/195505051986011-
WAHYU_ERIDIANA/Migrasi-1.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GE%20GRAFI/195505051986011-WAHYU_ERIDIANA/Migrasi-1.pdf)

inkonsistensi aparat pemerintah terkait dalam melakukan pengawasan dan pendampingan.

Pelabuhan Perikanan Lampulo dapat menjadi sentra industri perikanan internasional sama seperti Pasar Tsukiji yang ada di Jepang, tetapi harus dibangun dengan pondasi SDM yang baik, berkualitas, serta menjunjung tinggi kejujuran dan prinsip bisnis yang sehat. Jika pondasinya tidak berkualitas, maka institusi yang sudah dibangun akan roboh dalam beberapa tahun.

Hasil yang didapat bukannya membuat kehidupan komunitas nelayan menjadi sejahtera, justru akan membuat mereka terjatuh dalam lingkaran eksploitasi yang terstruktur, *massive*, dan tersembunyi. Semoga Pelabuhan Perikanan Samudera ini akan memenuhi harapan masyarakat Aceh, dan kemungkinan buruk yang telah disampaikan pada pembahasan di atas tidak pernah terjadi.

Dharma Kelana Putera, S.Sos. adalah Fungsional Umum Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
--

Lancang Kuning: Ekspresi Budaya Bahari Melayu

Oleh: Harvina

Pendahuluan

Istilah “nenek moyangku seorang pelaut” tidak asing lagi di pendengaran kita, yang menyadarkan kita bahwa sebenarnya bangsa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, dengan luas wilayah laut Indonesia yang terbesar di dunia dengan jumlah dan konfigurasi pulau-pulau yang unik dan strategis.

Strategisnya posisi kepulauan Indonesia memberikan peluang yang besar bagi Indonesia menjadi negara yang kuat secara maritim. Apalagi didukung dengan kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui dunia International lewat Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/UNCLOS 1982*. Pengakuan tersebut menjadikan wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, mencakup perairan yang mengelilingi seluruh pulau yang ada sampai dengan jarak 12 mil ke luar pantai.¹ Selain itu, bila di runut ke belakang, cerita-cerita yang mengindikasikan tentang kejayaan maritim Indonesia serta diperkuat dengan catatan-catatan sejarah yang mengungkapkan tentang kegemilangan pelaut-pelaut Indonesia dahulu, semua itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah sejak dahulu bersentuhan dengan dunia kebaharian.

Secara tidak langsung uraian di atas mengemukakan betapa kayanya Indonesia dengan dunia baharinya. Bahari merupakan nama lain dari laut, sedangkan

kebudayaan menurut Ruth Benedict merupakan pola-pola pemikiran serta tindakan tertentu yang terungkap dalam aktivitas.²

Lancang Kuning Ekspresi Budaya Bahari Masyarakat Melayu

Menurut Susanto Zuhdi dunia kemaritiman Melayu-Nusantara yakni penduduk yang bergerak dari pulau ke pulau telah memperlihatkan jaringan yang luas dalam abad-abad yang lampau.³ Pernyataan tersebut setidaknya ingin mengungkapkan bahwa masyarakat Melayu sejak masa lampau telah berhasil mengarungi lautan. Menurut catatan sejarah masyarakat Melayu adalah orang-orang yang terkenal dan mahir dalam ilmu pelayaran serta turut aktif dalam aktivitas perdagangan dari berbagai wilayah dunia. Begitu juga halnya dengan masyarakat Melayu yang tepatnya berada di daerah Sumatera Utara. Masyarakat Melayu juga dikenal dengan sebutan masyarakat pesisir sehingga ada istilah masyarakat Melayu Pesisir.⁴

Masyarakat Melayu Pesisir ialah mereka yang mendiami wilayah di sepanjang sungai, seperti Melayu Tamiang yang mendiami sepanjang sungai Tamiang, Melayu Deli yang mendiami sepanjang sungai Deli, Melayu Asahan yang mendiami sepanjang sungai Asahan. Wilayah geografis mereka yang berada di sepanjang sungai, membuat masyarakat di

¹. HM. Nasruddin Anshoriy Ch, dan kawan, *Negara Maritim Nusantara Jejak Sejarah Yang Terhapus*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm 5.

². Dr. Hans J. Daeng, 2008, *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm 45.

³. Susanto Zuhdi, *Jurnal Budaya Maritim, Kearifan Lokal, Dan Diaspora Buton*, FIB UI, hlm 176.

⁴. Muhammad Takari, dkk, 2012, *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*, USU Press, hlm 19.

sekitar situ menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Dalam menjalani ritme kehidupannya sebagian besar dunia mereka berada di laut. Laut bagi mereka memiliki roh atau jiwa sehingga patut untuk di hormati dan diberi penghargaan terhadap laut

Pemberian penghargaan terhadap laut pada masyarakat Melayu memunculkan berbagai ekspresi budaya kebaharian. Munculnya berbagai budaya kebaharian dapat terlihat dari adanya cerita-cerita berupa dongeng, legenda, mitos-mitos, pantun, hingga ritual-ritual yang berhubungan dengan kebaharian. Legenda Hang Tuah merupakan salah satu legenda yang hidup dalam kalangan masyarakat Melayu, dimana diceritakan bahwa berlayar di laut layaknya menggadaikan nyawa. Pergi dilepas beramai-ramai oleh sanak keluarga dan ketika pulang dikelilingi kembali oleh sanak keluarga. Ilustrasi kisah Hang Tuah layaknya para nelayan sekarang dimana pada saat mereka pergi ke laut di lepas dengan doa dan pengharapan agar mereka selamat dan sampai kembali. Ritual-ritual kebaharian yang hidup dalam masyarakat Melayu Pesisir, seperti Jamuan Laut dan doa tolak bala menandakan sebuah doa pengharapan agar mereka selamat mengarungi lautan serta menghargai arti keberadaan laut.

Dalam legenda Hang Tuah tersebut juga disertakan beberapa bait syair pantun yang mengisahkan betapa berlayar di laut penuh dengan bahaya dan justru menjadi tantangan bagi para pelaut. Pantun itu dikenal sebagai Lancang Kuning. Konon pantun ini merupakan simbol yang lahir di kalangan masyarakat pelaut Melayu.

Petikan Syair Pantun Lancang Kuning⁵

Lancang Kuning lancang pusaka
Tidak boleh ditukar reganti
Sebelum kering laut Malaka
Tidak boleh mungkirkan janji

Lancang kuning beranyut malang
Haluan menuju lautan dalam
Nahkoda baik jaga haluan
Takut lancang jadi tenggelam

Lancang kuning beranyut malang
Dipukul ombak timbul tenggelam
Baik-baik berlayar malam
Disitu banyak ranjan tenggelam

Bait-bait pantun dari Lancang Kuning sebenarnya ingin mengungkapkan ekspresi budaya bahari masyarakat Melayu. Lancang Kuning menceritakan semangat dan kegigihan para pelaut dalam mengarungi keganasan laut. Pantun tersebut ingin memberikan nasihat kepada nahkoda dan awak kapal agar bersiap sedia sebelum berangkat berlayar, dengan harapan kembali dengan selamat.

Konon, nama Lancang berasal dari kata kencang yang dikarenakan kendaraan ini sangat laju,⁶ sedangkan Kuning berarti lambang kemuliaan, namun pemakaian nama Kuning dikarenakan perahu tersebut berwarna kuning yang disebabkan oleh pengaruh kayu dammar. Lancang merupakan nama salah satu bentuk perahu layar yang dipergunakan sebagai transportasi antar pulau dan antar negara di masa kerajaan Melayu.⁷

Begitu kuatnya pengaruh Lancang Kuning, sehingga banyak dikisahkan dalam bentuk cerita rakyat Melayu serta nyanyian

⁵. Djoko Pramono, 2005, *Budaya Bahari*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm 140.

⁶.
<http://introduksimelayu.blogspot.com/2011/04/lancang-kuning.html>, unduhan hari senin tgl 2 februari 2015.pukul 10:12 wib

⁷. Drs.Zainal Arifin, AK, 2009, Mitra Medan (IKAPI), hlm 96.

rakyat Melayu. Dalam cerita rakyat Melayu Lancang Kuning dikisahkan sebuah perahu besar yang dipergunakan oleh raja-raja untuk berlayar. Selain itu, perahu lancang juga dipergunakan untuk berperang. Perahu Lancang digambarkan sebagai sebuah perahu besar yang mirip dengan perahu Phinisi. Perahu tersebut terbuat dari kayu-kayu yang berkualitas disertai dengan ukiran-ukiran, seperti pucuk rebung, akar pakis dan lainnya yang menjadi ciri khas ukiran Melayu.

Ilustrasi gambar Lancang Kuning⁸



Penutup

Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja kaya dengan sejarah dan budaya kebahariannya. Sejarah mencatat Indonesia sebagai bangsa maritim terbesar di dunia yang mampu memanfaatkan laut sebagai karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya sejarah yang menjadi bukti kekuatan bahari Indonesia, ekspresi budaya yang dimiliki oleh masyarakat bahari Indonesia, seperti halnya ekspresi budaya masyarakat Melayu yang dituangkan dalam bentuk cerita rakyat, mitos, pantun bahkan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan kebaharian, dimana semuanya ingin membuktikan kekayaan dan kekuatan bahari Indonesia.

Pantun Lancang Kuning yang merupakan ekspresi budaya bahari masyarakat Melayu merupakan bentuk catatan bagaimana kegigihan para pelaut dalam mengarungi lautan. Ekspresi budaya yang dituangkan dalam bentuk pantun setidaknya ingin mengungkapkan bahwa sebenarnya masyarakat Melayu telah dari dahulu mengarungi lautan serta bukti sejarah berupa bahasa Melayu yang dipergunakan oleh para pedagang dalam berdagang di seluruh kepulauan Nusantara.

⁸. temanak.com

Harvina, S.Sos. adalah Peneliti Pertama Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

Museum Bahari Aceh: Sebuah Gagasan dan Konsep

Oleh: Sudirman

Pendahuluan

Aceh memegang peranan penting dalam perjalanan sejarah di Nusantara, sehingga memiliki banyak aspek peninggalan sejarah dan budaya bahari, baik sebelum, selama maupun sesudah kesultanan Aceh. Potensi bahari sebagai bagian dari kekayaan Indonesia perlu dipertahankan dan dilestarikan, salah satunya melalui museum. Pembangunan museum sangat erat kaitannya dengan pelestarian kebudayaan. Pelestarian kebudayaan, meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pemanfaatan, meliputi upaya menggunakan hasil budaya untuk berbagai keperluan, seperti untuk menekankan citra identitas suatu bangsa, pendidikan kesadaran budaya, untuk dijadikan muatan industri budaya, dan sebagai daya tarik wisata.

Pendirian museum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan melalui berbagai koleksi dan kegiatan pendidikan atau sosialisasi di museum. Visi dan misi untuk menyelamatkan aset budaya bahari tersebut menjadi satu di antara latar belakang perlunya pembentukan Museum Bahari Aceh.

Museum Bahari

Museum merupakan lembaga tempat menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti materil

hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan budaya bangsa.¹ Museum diharapkan menjadi sebuah miniatur kebudayaan bangsa sebagai jendela informasi tentang sejarah dan budaya bangsa. Oleh karena itu, setiap orang yang berkunjung ke museum, akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang sejarah dan budaya. Adapun maritim adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan laut.² Namun, istilah maritim sering digunakan untuk menyebut negara, sedangkan yang berkaitan dengan budaya, sering digunakan istilah bahari; negara maritim atau budaya bahari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa museum bahari adalah lembaga tempat menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti materil hasil budaya bahari guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian budaya bangsa.

Museum bahari dapat berfungsi sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa.³ Sebagai tempat pelestarian, museum bahari berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi yang berkaitan dengan sejarah dan budaya bahari. Museum bahari juga dapat berfungsi sebagai tempat sumber data untuk bahan kajian kebaharian. Sebagai sumber informasi, museum bahari dapat berfungsi sebagai tempat untuk memperlihatkan perkembangan sejarah dan peradaban bahari, baik dilihat dari aspek sinkronik maupun diakronik. Tempat untuk

¹Kamus Peristilahan Museum. Jakarta: Direktorat Museum, 2001, hlm. 13.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2011, hlm. 879.

³Tatik Sujati, *Metode Pengadaan dan Pengelolaan Koleksi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Museum, 2000, hlm. 28.

rekreasi keilmuan, museum bahari dalam konteks sejarah peradaban manusia dapat dianggap sebagai penanda hadirnya suatu budaya. Dengan museum bahari yang representatif, kualitas, dan citra keberadaban suatu masyarakat Aceh dapat dilihat. Dalam konteks ini, museum bahari dapat dilihat sebagai tempat membentuk citra masyarakat Aceh atas suatu nilai sejarah, keunggulan atau prestasi, keilmuan, dan apresiasi yang telah dicapai di bidang bahari.

Konsep Pengelolaan Museum Bahari

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perencanaan dan persyaratan pendirian sebuah museum.

1. Lokasi

Pendirian museum perlu diperhatikan faktor lokasi. Hal itu dimaksudkan untuk menunjang kelestarian dan keamanan koleksi dan kenyamanan pengunjung. Untuk itu, perlu dipertimbangkan dengan baik kemudahan aksesibilitas dan kesehatan lingkungan. Lokasi museum sebaiknya berada jauh dari kawasan industri yang sarat dengan polusi, daerah berlumpur, berpasir, rawa, atau lokasi yang diketahui mengandung banyak rayap. Selain itu, perlu juga diperhatikan masalah suhu dan kelembaban udara demi mencegah kerusakan koleksi.

2. Bangunan Museum

Pembangunan gedung museum perlu dirancang sesuai dengan fungsi ruangan yang diperuntukkan bagi museum, antara lain pembangunan ruangan, jumlah dan ukuran ruangan, sirkulasi udara, pencahayaan, serta sirkulasi pengunjung. Bangunan museum sesuai dengan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Bangunan pokok, terdiri atas ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang auditorium, ruang kantor dan

perpustakaan, ruang laboratorium konservasi, ruang studio preparasi, dan ruang penyimpanan koleksi.

2. Bangunan penunjang, terdiri atas ruang keamanan, ruang toko cinderamata dan kafetaria, ruang loket penjualan tiket dan penitipan barang, ruang istirahat, toilet, tempat parkir, dan taman.

Zona pembagian area untuk setiap fungsi ruang sebaiknya dirancang secara tegas dan jelas, terutama alur pengunjung umum, karyawan museum, petugas keamanan, peneliti, atau orang-orang yang berkepentingan dan diperbolehkan masuk ke area tertentu. Pengunjung umum, seperti peneliti, pelajar, dan staf yang diperbolehkan memasuki ruang non-publik dengan izin khusus biasanya ditandai dengan menggunakan tanda pengenal khusus atau identitas khusus. Pembagian zona diatur dalam tata alur sirkulasi, sedangkan pengorganisasian ruang antara ruang non-publik dan ruang publik dirancang dalam alur masuk yang terpisah. Selain itu, perlu disediakan aksesibilitas bagi orang cacat, khususnya pada jalur masuk museum, jalur masuk ruang pameran, dan juga tangga.

Struktur ruang penyimpanan koleksi harus aman dari ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti serangga, polusi, debu, atau manusia. Demikian juga bagian-bagiannya, seperti dinding harus mampu menjaga stabilitas suhu dan kelembaban udara. Atap bebas dari kebocoran dan mampu mengurangi intensitas cahaya matahari. Selain itu, ruang penyimpanan koleksi harus memiliki pintu khusus untuk keluar-masuknya barang agar tidak mengganggu aktivitas lainnya. Diperlukan juga ruang penyimpanan sementara untuk menempatkan koleksi atau calon koleksi dalam rangka pembersihan dari kotoran dan debu sebelum disimpan dalam ruang penyimpanan yang steril.

Selain faktor fungsi, pembangunan gedung museum juga sebaiknya

memperhatikan faktor budaya. Desain gedung museum harus mencerminkan latar belakang budaya masyarakat Aceh. Hal itu sangat penting dilakukan karena identitas budaya tidak hanya diwakili oleh koleksi museum, tetapi gedung museum itu sendiri dibangun sebaik mewakili identitas dari berbagai latar belakang budaya masyarakat Aceh.

3. Koleksi Museum Bahari

Koleksi museum merupakan benda-benda bukti material karya budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.⁴ Koleksi museum didapat melalui proses pengadaan koleksi, yaitu suatu kegiatan pengumpulan berbagai benda yang akan dijadikan koleksi museum, baik berupa benda asli (*realia*) ataupun tidak asli (*replika*). Pengadaan koleksi pada prinsipnya adalah pemilihan suatu benda untuk dijadikan koleksi museum. Tidak semua benda dapat dijadikan koleksi museum. Ada kriteria yang harus dipenuhi, antara lain, mempunyai nilai sejarah dan ilmiah, dapat diidentifikasi, dan dapat dijadikan dokumen bagi penelitian ilmiah.⁵

Koleksi museum bahari dapat berupa jenis perahu, pukat, dan rakit, baik dalam bentuk fisik maupun visual. Alat tangkap ikan, baik dalam bentuk fisik maupun narasi dan visual. Jenis dan nama pulau, baik dalam bentuk teks maupun peta. Jenis ikan, baik dalam bentuk fisik (*dipamerkan dalam aquarium*) maupun narasi dan visual. Nama sungai, baik dalam bentuk narasi (*teks*) maupun visual. Nama laut, baik dalam bentuk narasi maupun visual. Nama pulau dan pelabuhan, baik dalam bentuk narasi maupun visual. Bentuk dan tempat wisata pantai, baik dalam bentuk

narasi maupun visual. Kerajaan-kerajaan maritim, baik dalam bentuk peta maupun narasi. Budaya bahari atau perilaku dan pengetahuan masyarakat terhadap laut dan sungai, baik dalam bentuk narasi maupun visual.

4. Desain Tata Pamer Ruang Koleksi

Ruang bagi sebuah pameran koleksi museum merupakan unsur yang penting, selain sebagai tempat mendisplay objek pameran, ruang juga digunakan sebagai aktivitas pengunjung. Oleh karena itu, penataan ruang begitu diperlukan dalam sebuah pameran. Dalam menata ruang pameran yang perlu diperhatikan adalah kepadatan, baik kepadatan objek maupun pengunjung sehingga tercipta kenyamanan. Hal itu disebabkan tujuan pameran tidak hanya tampil indah dan informatif, tetapi juga dipertimbangkan alur pengunjung dan pemahaman terhadap pameran koleksi. Beberapa koleksi yang dipandang menjadi *visual magnet* bagi pengunjung seharusnya ditempatkan pada sudut tertentu yang berfungsi untuk memudahkan pengunjung berapresiasi.

Mendesain objek atau ruang sebaiknya berdasar pada pertimbangan praktis, ekonomis, dan estetis. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan berkaitan dengan menata atau mendesain ruangan, yaitu:

1. Unsur apa yang ditata.
2. Siapa pengguna hasil penataan.
3. Prinsip atau kaidah penataannya.

Pengertian tentang unsur yang ditata meliputi pengetahuan berbagai koleksi, label, jenis dan bentuk panel, lemari, meja, lampu, pengaturan cahaya, pengaturan udara, dan berbagai sarana pendukungnya. Pada prinsip siapa

⁴ Mieke Langi dkk. *Kamus Peristilahan Permuseuman*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Direktorat Permuseuman, Proyek Pembinaan Permuseuman, 2001, hlm. 18.

⁵ Luhtfi Asiarto dkk. *Pedoman Museum Indonesia*. Jakarta: Direktorat Museum, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008, hlm. 21.

penggunanya berkaitan dengan latar belakang dan karakter pengunjung. Adapun prinsip dan kaidah penataan terkait erat dengan kemampuan manajemen dan pengetahuan kurator atau penggagas, khususnya pada persoalan mendisplay ruangan. Pekerjaan ini terkait erat dengan prinsip-prinsip komposisi yang berkenaan dengan pengetahuan tentang perbandingan, keseimbangan, kesatuan (intensitas) materi utama, dan pendukung yang akan dipamerkan. Dengan demikian, penataan yang baik adalah bagaimana menghubungkan antara koleksi, pengunjung, dan ruang sehingga satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan.

Pada tata pameran koleksi perlu pula dipertimbangkan aspek psikologis pengunjung. Faktor-faktor yang termasuk dalam aspek ini adalah faktor-faktor yang dapat menghambat atau mengurangi antusiasme pengunjung untuk memasuki ruang-ruang pameran. Bentuk ruangan mempengaruhi konsentrasi pandangan mata sehingga tidak fokus pada koleksi. Selain itu, pemakaian skala yang beraturan pada ruang-ruang pameran berdasarkan pengelompokan koleksi sehingga dapat memberikan suasana yang harmonis.

Faktor sirkulasi pengunjung juga seharusnya dipertimbangkan dalam desain ruangan. Ada beberapa sirkulasi pengunjung pameran dalam museum, yaitu:

1. Sirkulasi bebas, pengunjung di sini bebas memilih ruang mana yang akan didahulukan untuk dilihat. Akan tetapi, pengunjung tidak akan mengelilingi seluruh ruangan karena adanya beberapa sekat atau pintu keluar.
2. Sirkulasi bebas dengan pintu masuk dan keluar yang berbeda. Sirkulasi ini sama dengan sirkulasi pertama, tetapi pintu

masuk dan keluarnya berbeda. Pada ruang-ruang lain terdapat pintu yang saling berhubungan sehingga pengunjung dapat mengelilingi keseluruhan ruangan.

3. Sirkulasi bebas yang kompleks dengan kemungkinan mengelilingi keseluruhan ruang. Sirkulasi ini merupakan gabungan dari sirkulasi pertama dan kedua. Pengunjung mengelilingi keseluruhan ruangan melalui jalur yang lebih kompleks, pintu masuk dan pintu keluar letaknya berdekatan atau bersatu. Sirkulasi ini memungkinkan pengunjung mengelilingi keseluruhan ruang secara maksimal.

5. Penataan Koleksi

Penyajian koleksi di ruang pameran merupakan satu di antara bentuk komunikasi dan daya tarik terhadap koleksi. Informasi yang benar, akurat, dan data yang lengkap merupakan syarat utama dalam penyampaian informasi supaya koleksi yang disajikan dapat dimengerti, dipahami, dan menarik.⁶ Nilai penting suatu koleksi museum adalah pengetahuan, pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat atau tingkatan pendidikan yang datang ke museum senantiasa membutuhkan informasi di balik benda-benda yang disajikan.

Penyajian koleksi adalah suatu kegiatan mengatur koleksi di ruang pameran secara sistematis dan alur cerita, teknik pemajangan, metode, dan tata letak.⁷ Penyajian koleksi merupakan faktor penting dalam suatu pameran koleksi. Penyajian yang baik merupakan bagian yang dapat menimbulkan daya tarik terhadap koleksi yang dipamerkan. Penyajian koleksi erat kaitannya dengan

⁶Chandrawinata dalam *Museografi*. Vol. I. No. 1 September 2007: 108.

⁷Hamzuri (ed.). *Buku Pintar Tentang Permuseuman*. Jakarta: Direktorat Permuseuman.

Direktorat Jenderal Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994/1995, hlm. 56.

pengunjung sehingga diperlukan suatu prinsip agar pameran tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh pengunjung. Untuk itu, diperlukan prinsip-prinsip penyajian koleksi di ruang pamer, yaitu sistematika dan alur cerita.⁸ Sistematika dan alur cerita penyajian koleksi museum bahari diperlukan untuk mempermudah komunikasi dan penyampaian informasinya kepada pengunjung.

Metode penyajian koleksi yang digunakan dalam suatu tata pameran sebaiknya disesuaikan dengan motivasi pengunjung museum. Metode penyajian koleksi yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Metode estetik, untuk meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai artistik dari warisan budaya atau koleksi yang tersedia.
2. Metode tematik atau metode intelektual dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang guna, arti, dan fungsi koleksi.
3. Metode romantik untuk menggugah suasana penuh pengertian dan harmoni pengunjung mengenai suasana dan kenyataan-kenyataan sosial-budaya di antara berbagai suku bangsa.⁹

Teknik penyajian koleksi dapat dilakukan melalui empat tahap, yaitu:

1. Teknik konvensional. Teknik konvensional adalah teknik penyajian koleksi yang dipamerkan secara langsung, apa adanya, dan biasanya dapat langsung dinikmati oleh

pancaindera manusia, misalnya relief dan diorama.

2. Teknik media cetak. Teknik media cetak adalah teknik penyajian koleksi dengan direkam dalam media cetak, baik kertas maupun mikrofilm. Teknik ini biasanya digunakan untuk koleksi museum yang berharga atau berisiko hilang atau rusak ketika dipamerkan.
3. Teknik audio visual. Teknik audio visual adalah teknik penyajian koleksi museum yang dapat dinikmati melalui pertunjukan (*audio visual*) di layar yang telah disediakan.
4. Teknik simulasi. Teknik simulasi adalah teknik penyajian yang menggabungkan kecanggihan teknologi rancang bangun dengan teknologi elektronik, sehingga pengunjung dapat terlibat langsung dan menghayati koleksi museum yang dipamerkan secara hidup.¹⁰

Supaya penyajian koleksi tersebut menarik, sebaiknya diperhatikan pula empat faktor utama dalam penyajian koleksi, sebagai berikut:

1. Faktor cerita, yaitu fungsinya menyampaikan informasi koleksi dari semua aspek, seperti unsur sosial, budaya, teknologi, dan sejarahnya.
2. Faktor koleksi, yaitu koleksi harus berkaitan dengan cerita yang disajikan secara rinci dan sistematis. Hal ini dimaksudkan agar konsep penyajian dapat menjelaskan secara rinci semua koleksi yang diperlukan dalam menunjang jalannya cerita pameran.¹¹

⁸Luhthi Asianto dkk. *op.cit.*, hlm. 46.

⁹Direktorat Museum. *Pedoman Pengelolaan Museum*. Jakarta: Direktorat Museum. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007, hlm. 56.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan. *Kecil Tapi Indah: Pedoman Pendirian Museum*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Proyek Pembinaan Permuseuman, 1992/1993, hlm. 40-41.

3. Faktor sarana, yaitu berupa sarana, baik sarana dasar, seperti ruangan pameran, vitrin, dan panil maupun sarana penunjang, seperti foto penunjang, label, lampu, dan warna.
4. Teknik penyajian, yaitu meliputi ukuran minimal vitrin dan panil, tata cahaya, tata warna, tata letak, tata pengamanan, tata suara, labeling, serta foto-foto penunjang.¹²

Keempat faktor tersebut di atas, yaitu cerita, koleksi, sarana, dan teknik penyajian, baru dapat dilaksanakan apabila sudah dibuat disain penataan berdasarkan pendekatan tertentu. Pendekatan yang dianggap baik hingga saat ini adalah pendekatan yang berdasarkan motivasi pengunjung, yaitu:

1. Motivasi pengunjung untuk melihat keindahan benda-benda yang dipamerkan.
2. Motivasi pengunjung untuk menambah pengetahuan.
3. Motivasi pengunjung untuk melihat dan merasakan suasana tertentu pada pameran di museum.

Pendekatan yang dapat digunakan pada pameran tetap koleksi museum bahari, sebagai berikut. Pendekatan tersebut, yaitu:

1. Pendekatan intelektual, yaitu pendekatan yang menyajikan berbagai informasi koleksi dalam bentuk panel, koleksi dalam vitrin, dan label koleksi. Informasi tersebut disusun secara sistematis sehingga satu sama lain saling menjelaskan temanya. Dengan demikian, dapat membuat suatu

pemahaman yang utuh kepada pengunjung tentang sejarah dan budaya bahari.

2. Pendekatan evokatif, pendekatan ini terutama terlihat pada ruang aktivitas pengunjung. Pada ruang tersebut disajikan berbagai aktivitas masyarakat Aceh yang berhubungan dengan sejarah dan budaya bahari.
3. Pendekatan estetis, yakni pendekatan yang menyajikan informasi koleksi yang didukung oleh berbagai bentuk sarana pameran, seperti pedestal, label, dan panel yang berisi gambar atau foto dan tulisan. Selain itu, tata letak (keharmonisan, keseimbangan, dan ritme), tata warna yang serasi, dan tata cahaya.
4. Pendekatan kontemplatif, yaitu pendekatan yang menyajikan koleksi seperti pada pendekatan intelektual dan evokatif. Selain itu, ditambah lagi dengan penyajian koleksi melalui *audiovisual* pada ruang aktivitas. Pengunjung dapat berimajinasi ketika melihat tayangkan di layar TV sambil mendengarkan suara dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sejarah dan budaya bahari.
5. Pendekatan interaktif, yakni pendekatan yang menyajikan koleksi melalui media informasi, seperti *touchscreen*. Pengunjung dapat mencari informasi tentang koleksi museum dengan memanfaatkan media tersebut.¹³

Penutup

Dalam perkembangan dunia modern terdapat kecenderungan bahwa setiap masyarakat atau bangsa yang maju

¹²Direktorat Jenderal Kebudayaan. *Pedoman Teknis Pembuatan Sarana Pameran di Museum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993/1994: 67.

¹³Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1992/1993, *op.cit.*, hlm. 42.

meletakkan dasar atau kebijakan yang kuat terhadap pembangunan museum. Keberadaan museum dijadikan ikon utama dalam membangun citra sebagai manusia, masyarakat atau bangsa modern. Museum dianggap sebagai citra intelektual modernitas suatu masyarakat atau bangsa, bukan sebaliknya, yaitu membangun tempat-tempat belanja sehingga citra konsumerisme lebih dominan.

Aceh memiliki banyak potensi kemaritiman sebagai bagian dari kekayaan bangsa yang penting untuk dipertahankan dan dilestarikan, di antaranya melalui pendirian museum.

Kebutuhan untuk mendirikan museum bahari sangat penting guna membangun kesadaran sejarah dan identitas budaya daerah. Untuk itu, dibutuhkan kesungguhan atas maksud pendirinya dan dikelola secara professional sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebagai lembaga pelestarian dan pemanfaatan sejarah dan budaya, diharapkan Museum Bahari dapat memelopori pelestarian sejarah dan budaya daerah.

Sudirman, S.S. adalah Peneliti Madya Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
--

ATA SEMONAN

Cerita ini menceritakan asal usul Haloban yang diperkirakan bermula dari usaha membuka daerah baru. Pembukaan daerah baru tersebut dilakukan dengan menebang pohon-pohon untuk dijadikan perkampungan. Di antara pohon yang ditebang itu terdapat sebatang pohon besar yang bernama “halaban”. Konon, penebang pohon tersebut ikut tewas bersama robohnya batang halaban. Penebang pohon halaban itu tewas terhimpit pohon, yang kemudian dikenal dengan sebutan pulau Haloban.

Artine isakhok aloban senga membukha kali partamo Datok Besar. Curitone, nga mesa rajo ruwik singkil ngang ran waon akhuk anak. Terus rajoya banaza ia apobilo rise nga anak O silahe mangida lakhan warein layang-layang tenek bulawan. Nazar rajoya makbul. Permaisurine tubunya anakne silahe.

Tenek sarawal mek sarawalal anak silahe iya sunan menyapok monya mangidang mese pemuda senga ganteng. Pas sarawalal anak mangurangurane bamain ia laying-layang bulawan senga nihadiahken ayahne. Waon mesa ruwik rise niabek umabang laying-layang eda khuwak ek Ulo Tuangku. Tulalei ure katone betempat ruwik Lianggang. Mangkok sarawalal malao-lao ek eteng wala sampek ek eteng wala menak alek ata raro sedang bertengkar-tengkar. Leng semesaya deo membukha leng semesaya deo membukha. Mangkok niabek sira ata senga mararo era leng ne senga roar era were yame badakwa meita meruwik luma. Sampe ruwik luma menak ata seraro era rise ngang bakebun. Mangkok dengan isakhuk iyaya desira ngan siragana manganakne bahasone ngahe senga terdahulu tenek deo era. Dan mangkok tadi niurak e maknga me badakwa deo semambukha Haloban era. E bentang deo senga dahulu tanawu monya ek era basamo, sehingga basamo sira la era.

Ratelu sira alek ratuk era. Datuk Besar, Datuk Maharajo, Datuk Pamuncak, waiikhaikha tahun sira e la mangkok pado sarawalal desira malao bakhak asen alek

wukge. Sasampek sira Ulo Aisakhu rai enak alek eta eya mesa mangkok ken sira meruwik atep. Sampek ruwik atep reseraken ekm ise e betang sumaya e rera maibawo jadi rajo mayi mangkok niwetu reo era waon reyik manjadi rajo teen awo angkatan rajo. Cuma nganga nida, metabek rajo ruwik Pagaruyung sahinggo maisira meruwik Pagaruyung. Alek Bapak era sunan tolofda meruwi mangkok tajapuit teduwi rajo yang manamoken Malingkar Alam. Niabek teduwi alene imam-imam Garang Khatibne semangabek era sunan Khatib Lawe Khakhane. Pamangkune Pamangku Bajambek. Khakhanne Malikul Beraya Khatib era. Imam era sunan Khakhanne Malikul Qudus. Khakhan raji Malingkar Alam. Khakhan pamangku, pamangku Bajambek. Yang nyalahmangkok tajadi reseraken ek rajo wano era. Mako dinamokenne Pulau Tuangku. Senga menjadikan kerajaan Skhuya mangkok rahangkek mesahe datuk yang dinamoken Datuk Bendahara. Mangkok ninamoken datuk sengarahat. Datuk besar, Datuk Maharaja, Datuk Pamuncak, dan Datuk Bendahara Lakhanne Malikul Beraya ruwik Aishakhu karajone batukang-tukang bulawan. Bulawaniya nilotar-lotar wongkerane.

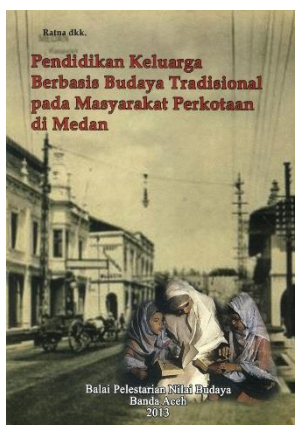
Mangkok rajo barampat mewano ek Luwan Bano, Datuk Besar mewano ek Lianggang, Datuk Maharaja mewano ek Asan Tola, datuk Pamuncak mewano ek Aie Dingin, Malikul Beraya mewano ek Wasakha. Malikul Qudus mewano wasakha.

Jadi ngang tasusun-susun masing-masing iya.

Sainggone tali uri era wesang tenek Sinawang, tenek Gunung Sitoli mewano ruwik Mariawa, dan Seri. Pado maso Belanda, ditariklah ata-ata era mek Nabahan, Mariawan, dan Seri Ke Kampung lamo, maso rajone Sultan Malingkar Alam. Jadi setelah ran-ran ek kampung lamo eda betahun-tahun mangenak situasine kampung lamonya kurang cocok, Sultan Malingkar Alam mawengan wesang mek Haloban. Nisebutken niyaya masone iyaya Kutaraja ruk eteng Khaen relek sumaya rera ngahe buktine wa'a. Yangnya nisebutken Kutaraja eda Haloban.

Nibuka eda mariya ayi yangnya tajadine ralek awak Haloban mangkok semangelek ia nirawet iya awak halabaniya mate. Yangnya roanalisaken saya rabakhakanek Haloban. Waktu maso Sultan Malingkar Alam yangnya sengabakarajaan ruwik kutaraja eda ruwik khalek relek ada sahinggo belanjut-lanjutlah rajo mek sultan manko meriyak kata Haloban Sultan Umar riseng barubah kadaanne yangnyalah masuk rakyat mek Haloban.

Cerita ini disadur dari : Cerita Rakyat Nanggroe Aceh Darussalam. Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2004.



TERBITAN

Dari
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
BANDA ACEH**

Ratna dkk, *Pendidikan Keluarga Berbasis Budaya Tradisional pada Masyarakat Perkotaan di Medan*, Banda Aceh: BPNB Banda Aceh, 2013; viii+100 hlm.

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang pendidikan keluarga dengan basis budaya tradisional yang terjadi pada masyarakat perkotaan di Medan. Pendidikan keluarga dengan basis budaya tradisional merupakan bagian penting dalam usaha pewarisan dan pelestarian budaya tradisional bangsa untuk menjaga identitas diri, baik yang bersifat lokal hingga nasional. Pendidikan keluarga ditanamkan pada seorang anak, dimana anak menjadi generasi penerus orang tua atau keluarga. Perhatian keluarga terhadap anak dimulai sejak anak belum lahir yaitu pada masa anak masih dalam kandungan. Setelah lahir seorang anak dididik oleh orang tuanya dengan menanamkan hal-hal yang bersifat baik seperti memberikan nasehat, menerangkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari, memberikan tauladan tanggung jawab baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan di luar keluarga. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat bersikap dan bertindak laku sesuai dengan adat budaya yang dimiliki, karena pendidikan anak merupakan aspek penting dari kebudayaan.

Saat ini, pendidikan keluarga berbasis budaya tradisional pada masyarakat kota Medan masih berlangsung meskipun dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Hal ini mengingat bahwa lingkungan masyarakat kota Medan yang plural dan multikultur. Perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan kota yang sibuk telah mempersempit ruang dan waktu untuk berkumpul bersama. Begitu juga dengan sistem pendidikan formal dewasa ini yang sangat ketat dan menuntut anak didik untuk memeras otaknya lebih kuat. Sehingga waktu orang tua berkomunikasi dengan anak menjadi terbatas terutama untuk bercerita persoalan adat dan budaya suku bangsa mereka sangat sedikit.

Buku ini diterbitkan sebagai salah satu tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh untuk mengkaji dan mempublikasikan kepada publik tentang tradisi dan budaya lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di kota Medan.